

GLOBALISASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya perang dingin, dunia telah dilanda oleh suatu arus perubahan yang bersifat global. Perubahan demi perubahan, akan terus berlanjut dalam abad 21. Pada mulanya wujud perubahan tersebut sangat nampak dalam perkembangan sistem informasi dan transportasi dengan fenomena dapat mempersingkat jarak dalam melakukan hubungan antar wilayah atau antar negara baik dalam arti ruang maupun waktu.

Globalisasi merupakan suatu perkembangan yang tidak bisa dihindari dan dicegah. Kemajuan-kemajuan di bidang teknologi komunikasi yang menghasilkan media yang canggih sehingga mempermudah terjadinya globalisasi. Teknologi informasi dan komunikasi telah menghubungkan manusia seluruh dunia menjadi satu sistem komunikasi. Teknologi telah memperlancar terbentuknya budaya dunia, yakni budaya yang dianut oleh seluruh umat manusia. Budaya tersebut bisa saja berasal salah satu bangsa atau ras. Namun proses globalisasi telah menjadikannya budaya semua orang diperkenalkan secara sistematis dan intensif ke seluruh pelosok dunia.

Era globalisasi yang berkembang dalam abad 21, memuat tantangan yang berbeda dari abad sebelumnya yang memuat nasionalisme, *national state*, politik nasional, ekonomi nasional dengan tekanan pada nasional dalam negara dengan perbatasan yang jelas. Era globalisasi memberi peranan yang lebih besar pada prakarsa dan kreativitas warga masyarakat melalui berbagai infrastruktur teknologi informasi dan transportasi, ekonomi, sosial budaya, politik atau elemen organisasi masyarakat. Setiap warga negara berkewajiban dan sekaligus merupakan suatu kehormatan apabila mampu menciptakan motivasi, tatanan, kondisi dan peluang yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan prakarsa masyarakat itu sendiri.

Memasuki era globalisasi, mengharuskan kita bersikap arif dan mampu merumuskan serta mengaktualisasikan kembali nilai-nilai kebangsaan yang tangguh dalam berinteraksi terhadap tatanan dunia luar dengan tetap berpijak pada jati diri bangsa, serta menyegarkan dan memperluas makna pemahaman kebangsaan kita dengan mengurangi berbagai dampak negatif yang akan timbul. Sudah saatnya, era globalisasi kita maknai dalam arti yang positif antara lain tumbuhnya persaingan yang sehat, tingkat kompetisi yang tinggi, harus serba cepat, dan sebagainya.

A. PROSES, ASPEK DAN DAMPAK GLOBALISASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

1. Pengertian Globalisasi

Kata globalisasi berasal dari “global” dalam **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, berarti **secara keseluruhan**. Globalisasi berarti *suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak nampak lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata*. Dalam keadaan global, tentu apa saja dapat

masuk sehingga sulit untuk disaring atau dikontrol. Terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, makna globalisasi memiliki dimensi luas dan kompleks yaitu bagaimana suatu negara yang memiliki batas-batas teritorial dan kedaulatan tidak akan berdaya untuk menepis penerobosan informasi, komunikasi dan transportasi yang dilakukan oleh masyarakat di luar perbatasan.

Globalisasi **dalam arti literal** adalah sebuah perubahan sosial, berupa bertambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemennya yang terjadi akibat *transkulturasi* dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional.

Demikian pula pendapat beragam yang dikemukakan para ahli berkaitan dengan konsep Globalisasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Malcolm Waters

Globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial-budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam kesadaran orang.

b. Emmanuel Ritscher

Globalisasi adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia.

c. Thomas L. Friedman

Globalisasi memiliki Dimensi Ideologi dan Teknologi. Dimensi Ideologi, yaitu kapitalisme dan pasar bebas, sedangkan Dimensi Teknologi adalah teknologi informasi yang telah menyatukan dunia.

d. Princeton N. Lyman

Globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antara negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan.

e. Leonor Briones

Demokrasi bukan hanya dalam bidang perniagaan dan ekonomi namun juga mencakup globalisasi terhadap institusi-institusi demokratis, pembangunan sosial, hak asasi manusia dan pergerakan wanita.

DEFINISI KONSEP

APAKAH GLOBALISASI ?

Konsep globalisasi memiliki pengertian yang beragam. Istilah globalisasi dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya. Misalnya, globalisasi dapat berarti sebagai pembentukan desa global (*global village*) yang berarti kontak yang lebih erat antara berbagai pelosok dunia, meningkatnya interaksi personal, saling kerja sama dan persahabatan antara penduduk dunia atau sebagai globalisasi ekonomi yang berarti meningkatnya hubungan antara pelaku ekonomi di berbagai negara.

Di era global inilah setiap bangsa dan negara menuju era baru yang disebut dengan "globalisasi". Globalisasi tersebut membuat batas-batas antar negara menjadi semakin kabur dalam bentuk "internasionalisasi", sehingga meningkatkan mobilitas dan dinamika masyarakat termasuk timbulnya gagasan-gagasan baru di seluruh bidang kehidupan.

Dalam hal **proses internasionalisasi**, semua negara cepat atau lambat akan mengalaminya dalam berbagai bidang atau struktur kehidupan. Misalnya, dalam struktur politik yang menuntut adanya keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan, maka sangat berkaitan dengan upaya tata pemerintahan yang bersih dan tidak korup.

Globalisasi merupakan **satu proses** untuk meletakkan dunia dibawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh wilayah dan kedudukan geografi sebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai wilayah dengan ruang udara, karena langit suatu negara terbuka luas untuk dimasuki oleh berbagai perantara media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi siber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan diantara sebuah negara dengan negara lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Globalisasi juga merujuk kepada perpindahan nilai, terutamanya cara berfikir & gaya bertindak dari satu wilayah negara kepada wilayah dunia lain. Globalisasi yang diberi arti luas ini adalah suatu hakikat yang tidak dapat diperdebatkan. Hakikatnya globalisasi itu sudah wujud sebelum istilah globalisasi diperkenalkan lagi. Fenomena globalisasi dapat digambarkan sebagai **gelombang yang melanda dunia**.

Beberapa pengertian lain tentang globalisasi adalah sebagai berikut :

1. Globalisasi mengacu pada keserbaragaman hubungan dan kesalingterkaitan antara negara dan masyarakat yang membentuk sistem dunia modern. Globalisasi adalah proses di mana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain (A.G. Mc.Grew, 1992).
2. Globalisasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan di dalam masyarakat (*changes*) dan dalam perekonomian dunia yang dihasilkan oleh meningkat pesatnya perdagangan dan pertukaran kebudayaan. Dalam arti ekonomi, globalisasi mengacu terutama pada liberalisme perdagangan atau perdagangan bebas (*free trade*) dari Wikipedia Encyclopedia.
3. Globalisasi mengacu pada proses di mana perdagangan, informasi dan budaya semakin bergerak melintas batas-batas negara (www.eco-justice.org/lexicon.asp).
4. Globalisasi adalah proses meningkatnya aliran barang, jasa, uang dan gagasan melintasi batas-batas negara dan sebagai akibatnya terjadinya integrasi ekonomi global (www.afsc.org/trade-matters/learn-abaut/glossary.htm).
5. Globalisasi adalah serangkaian proses yang mengarah pada integrasi sistem ekonomi, budaya, politik dan sosial melintasi batas-batas geografis (www.hsewebdepot.org/limstool/Gemi.nsf/WEBDocs/Glossary).

2. Proses Globalisasi

Perkembangan yang paling menonjol dalam era globalisasi, antara lain globalisasi informasi seperti berita, televisi dan bahan siaran. Demikian juga dalam bidang ekonomi (perdagangan), teknologi, wawasan, perilaku dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Dalam perkembangan global lainnya (*global trends*), misalnya dalam bidang kependudukan (migrasi dan lapangan kerja internasional), gejala lingkungan hidup (pemanasan global), gaya hidup, serta politik ekonomi seperti munculnya masyarakat ekonomi, wilayah pertumbuhan lintas negara (APEC, AFTA, SIJORI, dan sebagainya).

Berikut ini beberapa segi perkembangan bidang kehidupan, terkait dengan proses globalisasi yang mempunyai dampak luas terhadap masyarakat internasional.

No	Subyek Proses	Indikator Globalisasi	Contoh/Keterangan
1.	Globalisasi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> – Penunjang arus informasi global melalui siaran televisi baik langsung (melalui satelit) maupun tidak lang-sung (melalui paket siaran). – Semakin dinamis dan cepat, misalnya berita yang disiarkan pada <i>realtime</i> (dari tempat kejadian saat peristiwa terjadi) sehingga langsung dapat dikomunikasikan kepada masyarakat internasional. – Bila ada pergolakan atau keputusan pemerintah di satu belahan dunia, dapat berpengaruh terhadap lonjakan kurs mata uang, demonstrasi, aksi protes, dan sebagainya. 	Peristiwa gempa <i>tsunami</i> yang melanda kawasan ASIA pada tanggal 26 Desember 2004, dalam waktu singkat dapat disiarkan langsung oleh stasiun swasta Metro TV.
2.	Globalisasi Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> – Kemajuan pesat dalam teknologi komunikasi dan informasi dalam bentuk <i>sibernetik</i> 3K (komunikasi, komputer dan kendali). – Terbentuknya jaringan komunikasi global yang mampu memberikan pelayanan digital terpadu (<i>broadband integrated service digital network</i>) yang sekarang ini dimulai dengan internet. 	Melalui internet , kita dapat meminta, mengo-lah dan “ <i>memanipulas</i> ” segala informasi di manapun kita berada dalam berbagai bentuk (<i>alfanumerik</i> , suara, warna, gerak, <i>hardcopy</i> , dan lain-lain).
3.	Komunitas Global	<ul style="list-style-type: none"> – Perubahan nilai-nilai pada masyara-kat akibat arus informasi, misalnya dalam hal musik, pasar modal dan uang, bursa komoditi, pertaruhan dan sebagainya. – Adanya informasi yang berlangsung selama 24 jam sehari, merangsang tindakan <i>instant</i> dari peminatnya tanpa peduli waktu dan tempat. – Berkembangnya informasi seperti majalah, <i>newsletter</i>, berita faksimil, penerbitan elektronik dan sebagai-nya yang terbatas pada profesi tetentu yang membutuhkan perkem-bangan mutakhir setiap ada perubahan bidang tersebut. 	Memunculkan kelom-pok spesialis manusia global di suatu bidang tertentu yang lebih mengenal kelompoknya di luar negeri dari pada di negaranya sendiri.
4.	Peledakan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> – Kemajuan iptek dan arus komuni-kasi global yang makin canggih, cepat dan berkapasitas tinggi. – Laju pertumbuhan dan akumulasi pengetahuan serta informasi meningkat sangat cepat secara tajam (<i>eksponensial</i>). 	Menurut para ahli, bahwa informasi yang dihasilkan dalam 30 tahun terakhir lebih banyak dari produksi 5000 tahun sebelum-nya.
5.	Kecemasan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> – Kompleksitas informasi baik jenis, jumlah, maupun kualitasnya yang berkembang disegala bidang termasuk juga informasi yang tidak berguna (limbah). – Orang berlomba-lomba mengum-pulkan sebanyak-banyaknya infor-masi, meskipun pada akhirnya 	Cepat berkembangnya isu-isu tertentu yang belum jelas sumbernya, namun sudah dipercaya menjadi masalah aktual, misalnya: terorisme, wabah penyakit, dll.

		tidak mampu mengelola dengan cepat dan tepat.	
6.	Masyarakat Informasi	<ul style="list-style-type: none"> – Terjadinya perkembangan struktur ekonomi negara maju, yaitu dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. – Sektor informasi memainkan peranan terbesar dibanding sektor industri dan pertanian. – Dalam konteks pembangunan, teknologi informasi merupakan pisau bermata dua. Dari satu sisi, dapat memacu pertumbuhan dan kemajuan. Tetapi dari segi lain, dapat pula menimbulkan serta memperbesar ke-senjangan sosial seraya menghambat upaya pemerataan. 	Di negara-negara maju, masyarakat miskin sulit bersaing dalam memperoleh pekerjaan yang layak, mereka lebih banyak mengerjakan pekerjaan dengan 3 D (<i>dark, dirty, dan danger</i>)

3. Fenomena Globalisasi

Fenomena globalisasi yang sedang dihadapkan oleh umat manusia semenjak abad ke-20 dapat ditandai oleh beberapa hal, di antaranya adalah :

- a. **Arus Etnis** ditandai dengan mobilitas manusia yang tinggi dalam bentuk imigran, turis, pengungsi, tenaga kerja dan pendatang. Arus manusia ini telah melewati batas-batas teritorial negara.
- b. **Arus Teknologi** ditandai dengan mobilitas teknologi, munculnya multinational corporation dan transnational corporation yang kegiatannya dapat menembus batas-batas negara.
- c. **Arus Keuangan** yang ditandai dengan makin tingginya mobilitas modal, investasi, pembelian melalui internet penyimpanan uang di bank asing.
- d. **Arus Media** yang ditandai dengan makin kuatnya mobilitas informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai peristiwa di belahan dunia seakan-akan berada di hadapan kita karena cepatnya informasi.
- e. **Arus Ide** yang ditandai dengan makin derasnya nilai baru yang masuk ke suatu negara. Dalam arus ide ini muncul isu-isu yang telah menjadi bagian dari masyarakat internasional. Isu-isu ini merupakan isu internasional yang tidak hanya berlaku di suatu wilayah nasional negara.

Berdasarkan fenomena yang nampak pada globalisasi, dapat dijumpai adanya tanda-tanda yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari tentang globalisasi sebagai berikut :

- a. Meningkatnya perdagangan global.
- b. Meningkatnya aliran modal internasional, diantaranya investasi langsung luar negeri.
- c. Meningkatnya aliran data lintas batas, seperti penggunaan internet, satelit komunikasi dan telepon.
- d. Adanya desakan berbagai pihak untuk mengadili para penjahat perang di Mahkamah Kejahatan Internasional (*International Criminal Court*), dan adanya gerakan untuk menyerukan keadilan internasional.

- e. Meningkatnya pertukaran budaya (*cultural exchange*) internasional, misalnya melalui ekspor film-film *Hollywood and Bollywood*.
- f. Menyebarluasnya paham multikulturalisme dan semakin besarnya akses individu terhadap berbagai macam budaya.
- g. Meningkatnya perjalanan dan turisme lintas negara.
- h. Berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global.
- i. Berkembangnya sistem keuangan global.
- j. Meningkatnya aktivitas perekonomian dunia yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional.
- k. Meningkatnya peran organisasi-organisasi internasional, seperti WTO, WIPO, IMF, yang berurusan dengan transaksi-transaksi internasional.

3. Aspek-Aspek Globalisasi

a. Aspek Ekonomi

Mengacu kepada makin menyatunya unit-unit ekonomi di dunia ke dalam satu unit ekonomi dunia.

b. Aspek Kebudayaan dan Keagamaan

Mengacu kepada gagasan-gagasan baru yang datang dari seluruh dunia, terutama masyarakat negara maju yang berangsur-angsur mengubah pola gagasan budaya dan agama asli suatu bangsa.

c. Aspek Teknologi

Adanya perkembangan teknologi informasi yang pada akhirnya menyatukan dunia menjadi sebuah tempat tanpa batas.

d. Aspek Demografi

Merujuk kepada penghijrahan manusia yang berlaku sehingga merubah pola demografi sebuah negara.

4. Trens Era Globalisasi

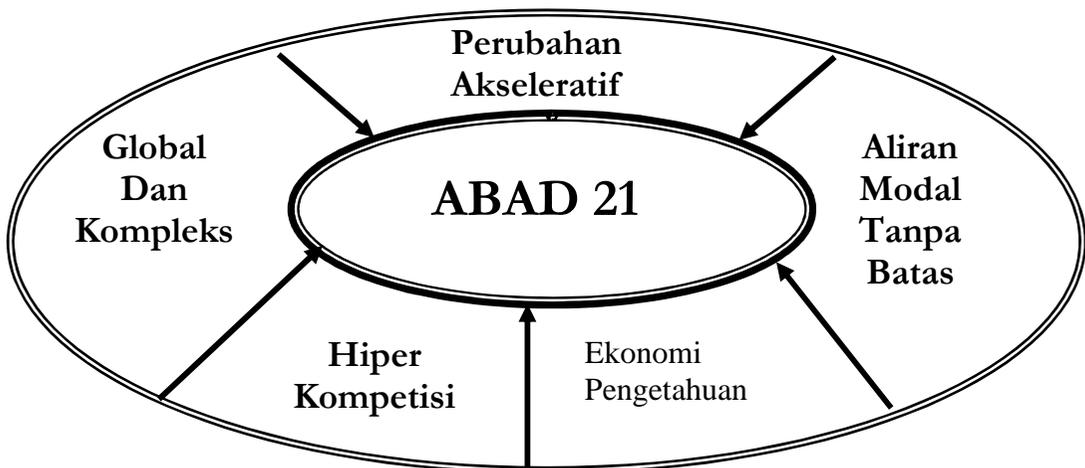
Era globalisasi yang akan terus berlanjut dalam abad 21, pada mulanya merupakan wujud perubahan dan perkembangan sistem informasi, telekomunikasi serta transportasi dengan fenomena yaitu dapat mempersingkat jarak dalam hubungan antar negara atau antar wilayah dalam batas ruang dan waktu. Dalam perkembangan demikian, telah dimungkinkan oleh terjadinya kemajuan-kemajuan yang cepat dan menakjubkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Tentu saja kemajuan-kemajuan Iptek tersebut dapat dicapai berkat adanya kemampuan ekonomi dunia melalui aliran modal tanpa batas untuk mendukungnya. Sebagaimana yang sedang kita saksikan, adanya keterkaitan antara kedua faktor Iptek dan kemampuan ekonomi ini telah menimbulkan perubahan-perubahan yang cepat dan luar biasa di seantero dunia, serta tingkat kompetisi yang tinggi, dan tidak terkecuali pada masyarakat Indonesia.

Adapun beberapa trens tentang globalisasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Perubahan Akseleratif*, yaitu merupakan perubahan yang sangat cepat dalam segala bidang terutama yang berhubungan dengan interdependensi atau ketergantungan dengan ekonomi, teknologi informasi dan komunikasi di antara negara-negara di dunia.
- b. *Aliran Modal Tanpa Batas*, yaitu tumbuhnya iklim investasi yang mencakup berbagai produk. Banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan ekspansi ke negara-negara lain untuk mendapatkan komponen-komponen produk yang tidak lagi dari anak perusahaannya, tapi dapat juga dari perusahaan-perusahaan lain sehingga terwujud produk barang jadi.
- c. *Ekonomi Pengetahuan*, yaitu bahwa globalisasi telah membawa hubungan ekonomi antar bangsa yang ditandai saling ketergantungan antara negara-negara maju dan negara berkembang dengan segala implikasi yang ditimbulkannya. Hal ini menjadi kajian ilmu pengetahuan bagi para akademisi, ekonom, perumus kebijakan baik pemerintah maupun dunia usaha.
- d. *Hiper Kompetisi*, yaitu segala daya upaya yang dilakukan baik dari dunia usaha, dunia industri maupun pemerintah yang selalu berkompetisi untuk memperoleh simpati dan segmen pasar yang sebanyak-banyaknya. Pemanfaatan media komunikasi dan informasi sangat gencar dalam publikasi untuk menawarkan produk-produk unggulan yang berkualitas dengan segala kelebihannya sesuai dengan trens yang ada di dalam masyarakat.
- e. *Global dan Kompleks*, yaitu segala hal yang terkait dengan transnasional produk telah terjadi saling ketergantungan yang memerlukan tingkat manajemen tinggi dan kompleks. Oleh sebab itu, globalisasi telah memberikan implikasi analisis pemikiran yang *integrated* dan komprehensif.

Trens atau karakteristik globalisasi abad 21 dapat digambarkan sebagai berikut :



5. Tantangan Globalisasi

Tantangan nyata pada era globalisasi adalah semakin kompleksnya berbagai bidang kehidupan karena adanya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi yang membawa pengaruh terhadap berbagai nilai dan wawasan masyarakat internasional. Tantangan globalisasi yang mendasar dan akan dihadapi, antara lain sebagai berikut :

- a. *Sikap Individualisme*, yaitu munculnya kecenderungan mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan bersama, memudarkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial, musyawarah mufakat, gotong royong dan sebagainya.
- b. *Apresiasi Generasi Muda*, yaitu banyaknya generasi muda yang sudah melupakan para pejuang dan jati diri bangsanya dengan fenomena baru yaitu lebih tahu dan mengidolakan artis, bintang-bintang film, pemain sepak bola asing yang ditiru dengan segala macam aksesorisnya.
- c. *Pandangan Kritis terhadap Ideologi Negaranya*, yaitu banyaknya masyarakat yang sudah acuh tak acuh terhadap ideologi atau falsafah negaranya. Mereka sudah tidak tertarik lagi untuk membahasnya bahkan lebih cenderung bersikap kritis dalam operasionalnya dengan cara membanding-bandingkan dengan ideologi lain yang dianggapnya lebih baik.
- d. *Diversifikasi Masyarakat*, yaitu munculnya kelompok-kelompok masyarakat dengan profesi tertentu yang terus berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan guna mencapai tingkat kesejahteraan yang bertaraf internasional (mengglobal).
- e. *Keterbukaan Yang Lebih Tinggi*, yaitu tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang lebih mengedepankan pendekatan dialogis, demokratisasi, supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien.

6. Pelaku Atau Subjek Globalisasi

Para pelaku atau subjek dari globalisasi yang berperan dalam tumbuh-kembangnya tatanan dunia global, dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Negara-negara yang dipetakan secara *dikotomis*, yaitu negara-negara besar dan negara-negara kecil, negara-negara maju dan negara-negara berkembang, negara-negara yang kuat dan yang lemah secara ekonomi, negara-negara yang berdiri sendiri atau yang bergabung dengan negara lain, dan lain sebagainya.
- b. Organisasi-organisasi antar pemerintah (IGO atau *International-Governmental Organizations*), seperti ASEAN, NATO, *European Community* dan lain sebagainya.
- c. Perusahaan internasional yang dikenal dengan *Multinational Corporation* (MNC) atau *Transnational Corporation* atau *Global Firms*. Perusahaan-perusahaan ini dengan modalnya yang besar dan bersifat deterritorialis meluaskan jaringannya ke segala penjuru dunia. Pemerintah, pada khususnya negara-negara berkembang merasa perlu mendapatkan modal dan teknologinya. Fenomena pengaruh **George Soros** terhadap kebijakan politik global merupakan contoh dari peran perusahaan internasional dalam percaturan politik global.
- d. Organisasi internasional atau transnasional yang non pemerintah (INGO, *International Non-Governmental Organizations*) seperti Palang Merah Internasional di dirikan tahun 1867, *Workingmen's Association* (*Sosialist*

International) tahun 1860-an, *International Women's League for Peace and Freedom*. Organisasi konvensional seperti: Vatikan, Dewan Gereja-gereja Sedunia, Rabiyyatul Islamiyah. Yang modern seperti *Amnesty International*, *Green-Peace International*, *World Conference on Religion and Peace*, *World Federation of United Nations Associations*, *Trans-Parency International*, *Worldwatch*, *Human Rights Watch* dan *Refugee International*. Organisasi global ini lebih tepat disebut aktivis profesional. Pendapat umum dan kebijakan dunia ternyata banyak sekali dipengaruhi oleh organisasi aktivis ini. Gagasan-gagasan mereka banyak disalurkan melalui media massa elit dunia, seperti *International Herald Tribune*, *The Guardian*, *Times* dan *The Economist*.

- e. Organisasi-organisasi non formal, rahasia dan setengah rahasia. seperti: mafia, teroris, pembajak, penyelundup, preman global, tentara bayaran, hacker komputer dan mungkin juga organisasi semacam Al-Qaeda.

7. Dampak Globalisasi

Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat berarti dalam dimensi kehidupan manusia. Globalisasi merupakan proses internasionalisasi seluruh tatanan masyarakat modern. Pada awalnya ini hanya ada pada tataran ekonomi, namun dalam perkembangannya cenderung menunjukkan keragaman. **Malcolm Waters** mengemukakan bahwa ada 3 (tiga) dimensi proses globalisasi, yaitu: **Globalisasi Ekonomi**, **Globalisasi Politik** dan **Globalisasi Budaya**.

Dari segi dimensi globalisasi budaya, muncul beberapa jenis space atau lukisan, seperti : *emospace*, *technospace*, *finanspace*, *mediaspace*, *ideospace* dan *sacrispace*. Dengan demikian, universalisasi sistem nilai global yang terjadi dalam dimensi kebudayaan telah mengaburkan sistem nilai (*values system*) kehidupan manusia, khususnya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam menghadapi tahun era pasar bebas. Berikut adalah dampak globalisasi diberbagai bidang :

- a. **Ekonomi**, yaitu terbentuknya masyarakat global yang tidak lagi tergantung batas-batas wilayah. Dalam globalisasi bidang ekonomi telah terjadi perdagangan internasional pasar bebas, dibentuknya kerjasama regional, bilateral, maupun multilateral. Berdirinya organisasi World Bank, *World Trade Organization*, *Asian Free Trade Area* dan lain-lain.
- b. **Ideologi**, yaitu timbulnya dua ideologi besar yang menguasai dunia (Liberal dan Sosialis), di mana keduanya saling bertentangan. Ideologi **Liberal** menganut paham kebebasan untuk tiap individu merupakan jalan mencapai kebahagiaan, sementara ideologi **Sosialis** mengekang kebebasan rakyat untuk mencapai masyarakat yang makmur. Dengan globalisasi ideologi, berdampak luas terhadap upaya-upaya suatu negara dalam mewujudkan sistem politik, ekonomi maupun sosial budayanya.
- c. **Politik**, yaitu pengaruh globalisasi pada sistem politik di berbagai negara yang berkembang seperti sistem politik demokrasi Liberal, demokrasi Pancasila, Sosialis, Komunis dan sebagainya. Salah contohnya di Indonesia, yaitu terjadinya dinamika ketatanegaraan sistem politik yang mula-mula berbentuk demokrasi liberal, kemudian menjadi demokrasi terpimpin dan akhirnya menjadi demokrasi pancasila yang dianut hingga sekarang ini.

- d. **Hankam**, yaitu adanya upaya-upaya setiap negara dalam mempertahankan kedaulatan negaranya melalui pembuatan sistem persenjataan maupun pemberdayaan rakyat dan tentaranya. Globalisasi bidang hankam yang pernah dirasakan masyarakat dunia, yaitu dengan dibentuknya pakta pertahanan NATO, SEATO, WARSAWA, dan sebagainya. Dalam bidang hankam, negara Indonesia selain memperkuat berbagai sistem persenjataan di darat, udara dan laut juga melakukan upaya-upaya keamanan rakyat semesta dan kedaulatan nasional. Negara Indonesia dalam partisipasi menjaga keaman internasional, juga pernah mengirim Pasukan Garuda kebeberapa negara atas mandat Dewan Keamanan PBB.
- e. **Sosial**, yaitu banyaknya nilai-nilai dan budaya masyarakat yang mengalami perubahan dengan cara meniru atau menerapkannya secara selektif . Salah satu contoh perubahan di bidang sosial yaitu dengan hadirnya modernisasi di segala bidang kehidupan, terjadi perubahan ciri kehidupan masyarakat desa yang tadinya syarat dengan nilai-nilai gotong royong menjadi individual. Selain itu juga timbulnya sifat ingin serba mudah dan gampang (*instan*) pada diri seseorang. Pada sebagian masyarakat, juga sudah banyak yang mengikuti nilai-nilai budaya luar yang dapat berpengaruh negatif maupun positif.

Dampak Positif dan Negatif Globalisasi

Dampak Positif	Dampak Negatif
<ul style="list-style-type: none"> a. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi. b. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. c. Kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi meningkatkan efisiensi. d. Mendukung nasionalisme dalam menggalakkan proses integrasi antara lain dengan mendobrak etnosentrik. e. Peningkatan mobilitas social dan penguatan kelas menengah. f. Komunikasi yang lebih mudah dan juga murah. g. Peluang yang lebih luas bagi manusia berbagai etnik, bangsa, budaya dan agama untuk berinteraksi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa. b. Eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang makin besar. c. Dalam bidang ekonomi, berkembang nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai sosial masyarakat. d. Terjadi dehumanisasi, yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. e. Timbulnya dominansi negara-negara maju yang mempunyai kekuatan yang lebih kuat. f. Mengakibatkan erosi terhadap nilai-nilai tradisi. g. Timbul gejala-gejala seperti konsumerisme, materialisme, kendornya moralitas, dsb. h. Pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbedaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sebuah negara dan antar sektor-sektor ekonomi. i. Masyarakat yang terbentuk lebih tidak kreatif, kurang bersemangat dan berwatak hedonistik. j. Merebaknya kebiasaan meniru hasil-hasil iptek dari negara lain.

Masyarakat dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan diri agar dapat memenangkan arus globalisasi ini. Tujuannya adalah mendapatkan segi-segi positif dari globalisasi dan mampu menghindarkan diri dari aspek negative globalisasi. Hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan.
- b. Pemberian keterampilan hidup (*life skill*) agar mampu menciptakan kreativitas dan kemandirian.
- c. Usaha menumbuhkan budaya dan sikap hidup global, seperti mandiri, kreatif, menghargai karya, optimis dan terbuka.
- d. Usaha selalu menumbuhkan wawasan kebangsaan dan identitas nasional.
- e. Usaha menciptakan pemerintahan yang transparan dan demokratis.

8. Isu-isu Internasional Sebagai Dampak Globalisasi

Akibat arus budaya global, isu-isu internasional sekarang ini banyak berpengaruh pada aspek politik. Pengaruh itu, meliputi isu tentang demokrasi, isu hak asasi manusia dan transparansi (keterbukaan). Pada aspek sosial budaya, muncul isu tentang perlunya sikap pluralisme dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam bidang ekonomi muncul pasar global, sedangkan di bidang keamanan muncul isu tentang terorisme.

Beberapa isu internasional terkait dengan dampak globalisasi yang paling sering muncul kepermukaan adalah sebagai berikut :

Isu-isu Globalisasi	Uraian	Keterangan
Demokrasi	<p>Paham demokrasi berasaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi negara. Demokrasi sebagai sistem politik harus mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Semua negara ingin disebut sebagai negara demokrasi. Negara-negara yang belum berpemerintahan demokrasi atau masih melakukan praktek pemerintahan otoriter banyak dikecam oleh negara lain.</p>	<p>Negara-negara otoriter umumnya terkucilkan dari pergaulan internasional.</p>
Hak Asasi Manusia	<p>Masalah hak asasi manusia berkaitan erat dengan demokrasi. Sekarang ini dunia internasional sangat memperhatikan penegakan hak asasi manusia.</p> <p>Adanya berbagai perang, pertentangan dan konflik antar bangsa dikarenakan adanya penindasan terhadap hak asasi manusia dan perilaku sewenang-wenang.</p>	<p>Masalah hak asasi manusia sudah merupakan masalah internasional.</p>
Transparansi (keterbukaan)	<p>Transparansi atau keterbukaan terutama ditujukan pada penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintahan yang</p>	<p>Penyelenggaraan negara diharapkan</p>

	<p>tertutup tidak akan lama bertahan sebab kemajuan informasi telah mampu menerobos berbagai ketertutupan yang disembunyikan pemerintah.</p> <p>Pemerintahan yang tertutup juga dianggap tidak demokratis karena tidak ada pertanggungjawaban publik dan tidak mengikutsertakan rakyat dalam bernegara. Hal ini bertentangan dengan pesan demokrasi.</p>	berlaku terbuka dan transparan terhadap rakyatnya.
Pelestarian Lingkungan Hidup	<p>Lingkungan hidup merupakan isu internasional yang ditujukan kepada negara-negara. Sekarang ini lingkungan hidup yang rusak dapat menjadi ancaman baru bagi umat manusia.</p> <p>Negara-negara yang memiliki kekayaan alam dan hutan dihimbau untuk serius dalam melestarikan lingkungan hidup. Misalnya, kebakaran hutan di Kalimantan bukan hanya merugikan Indonesia tetapi mengganggu negara-negara tetangga bahkan mengancam ekosistem dunia.</p>	Tindakan terhadap perusakan lingkungan selalu akan mendapat kecaman masyarakat internasional.
Pluralisme	<p>Dalam masyarakat global, hubungan antar manusia akan semakin intensif dan tidak hanya manusia sebangsa, tetapi manusia yang berbeda ras, agama, nilai budaya, bahasa dan adat. Sikap menghargai keberanekaan perbedaan (<i>pluralisme</i>) sangat dibutuhkan.</p>	Apabila suatu bangsa memaksakan nilai budayanya dan tidak menghargai budaya lain maka hubungan global akan rusak.
Pasar global dan Pesaing global	<p>Dalam era global, barang, jasa dan produk dari berbagai Negara akan masuk dan saling berkompetisi dengan produk lokal. Arus keluar masuk barang dan jasa tidak lagi dibatasi.</p>	Di wilayah-wilayah regional dibentuk pasar bersama, misalnya di Asia dengan pemberlakuan AFTA 2003.

Atlas Globalisasi

Oleh B Herry-Priyono

BAGI Anda yang letih menyaksikan absurditas Pemilihan Umum 2004, namun setia menyimak gejala mondial yang sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi-politik kita (dengan atau tanpa Pemilu 2004), sebuah atlas hasil penelitian *The New Global History Initiative* telah terbit. Judulnya, *Global Inc.: An Atlas of the Multinational Corporation* (2003).

Seperti layaknya atlas, buku **Medard Gabel** (*CEO Global Links Consulting*) dan **Henry Bruner** (ahli geografi ekonomi) ini laksana teropong yang menyorot lanskap bola dunia yang dijelajahi nama-nama, seperti **Toyota, Exxon Mobil, Du Pont, Microsoft, Siemens, Citibank**, dan sebagainya. Seperti ditulis para penyusunnya, atlas warnawarni ini bisa dikatakan sebagai atlas globalisasi, dan perusahaan-perusahaan multinasional yang di tahun 2000 berjumlah 63.312 "**memang pelaku utama globalisasi**". Butir ini bukan hal baru, sebagaimana mereka yang mencermati globalisasi telah berulang kali menunjuknya, dari **Joseph Stiglitz** sampai **George Soros**, dari **Saskia Sassen** sampai **Susan George**.

Pelaku utama

Argumen seperti itu bisa dibaca dengan panas, bisa pula dengan dingin. Bagi mereka yang membaca dengan panas, temuan itu biasanya segera dianggap sebagai simplifikasi serta cara "**mengeroyok dan menuding korporasi**". Biasanya juga disertai pendapat bahwa globalisasi adalah gejala kompleks; bisa ditambah pula dengan usul agar kompleksitas globalisasi didekati dengan *Complexity Theory* (bdk. esai Pitoyo Adhi, "Jantung Perkara Globalisasi", Kompas 27/1/04).

Pandangan itu mengagumkan, tetapi mengatakan globalisasi sebagai gejala kompleks dan perlu didekati dengan teori kompleksitas sama dengan mengatakan terlalu banyak dan terlalu sedikit. Guru saya dulu bilang bahwa itu sama dengan tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja kita mengerti revolusi teknologi merupakan penyangga globalisasi. Siapa penggerakannya? Para sufi? Bukan. Dalam bahasa **Gabel** dan **Bruner**, "*Tanpa kemajuan teknologi yang menggerakkan globalisasi, perusahaan tidak akan bisa merentang seluas dunia; dan tanpa penggunaan agresif, pengembangan lanjut, serta pengerahan berbagai teknologi oleh perusahaan-perusahaan, globalisasi barangkali tidak akan terjadi, atau sekurangnya tidak berlangsung secepat seperti yang telah terjadi.*"

Bagi para penyimak perdebatan yang terus berlangsung dalam ilmu-ilmu manusia, argumen tentang teknologi sebagai penggerak merupakan argumen memikat. Akan tetapi, argumen itu pada akhirnya tidak bisa mengelak dari pertanyaan tentang pelaku (*agency*), yang dalam dunia manusia selalu melibatkan orang-orang konkret. Alternatifnya adalah menunjuk globalisasi sebagai *labirin struktural* yang kompleks, seolah-olah tidak punya pelaku dengan berbagai kadar keterlibatan dalam ke-pelaku-an itu.

Karena itu, meskipun tidak ada kaitannya, jangan heran bila menunjuk perusahaan-perusahaan transnasional sebagai pelaku utama globalisasi segera dianggap sebagai moralis. Sebabnya sederhana: teknologi tanpa *agency* memang tak punya masalah moral. Tetapi, itu juga tak pernah ada di mana pun di dunia manusia. Tentu, buru-buru berceles tentang moralitas sebelum mencermati fakta juga bukan keutamaan analisis.

Pertama, globalisasi adalah fakta dan kondisi sejarah, bukan barang seperti televisi Sony atau tas Gucci yang begitu saja bisa diterima atau ditolak. Justru, karena ia kondisi

sejarah, perdebatan pro dan kontra adalah perdebatan yang mandul. Itu mirip dengan dua mahasiswi jurusan komputer yang berantem apakah mereka perlu terampil menjalankan program dasar komputer.

Kedua, globalisasi bukan gejala alami, seperti musim semi dan gempa bumi. Ia gejala yang muncul dari praktik dan pemikiran manusia, seberapa pun kompleks proses yang membentuknya. Pokok ini rupanya sentral karena menganggap globalisasi sebagai gejala alami yang membawa kita ke dalam perangkat determinisme alam yang kosong dari sebab-akibat manusia. Tentu, mengatakan bahwa globalisasi merupakan hasil praktik/gagasan manusia tidak berarti corak globalisasi dewasa ini mudah diubah atau dimodifikasi. Akan tetapi, fakta tentang sulitnya mengubah atau memodifikasi corak globalisasi tidak bisa dijadikan dasar untuk bilang globalisasi sebagai gejala alami.

Ketiga, seperti halnya gejala lain dalam hidup manusia, globalisasi juga mengandung ambivalensi. Sebagai contoh analog, pesawat telepon bisa dipakai Pinochet mempercepat penyalpahan para penentangannya, tetapi bisa juga dipakai para penentangannya mengorganisasikan diri. Ambivalensi tak akan pernah muncul apabila soalnya tidak dipahami sebagai sebab-akibat tindakan manusia. Tetapi, itu juga hanya mungkin bila globalisasi dipahami sebagai produk kinerja berbagai dorongan yang menggerakkan praktik dan pemikiran manusia, seperti hasrat inovasi, hasrat diakui, ambisi, kekuasaan, dan sebagainya. Lugasnya, suatu gejala bersifat ambivalen jika, dan hanya jika, gejala itu melibatkan manusia.

Keempat, ambivalensi globalisasi tidak akan lenyap. Sejarah ke depan akan ditandai semakin banyak ambivalensi. Dalam bahasa Paulo Coelho, penulis novel *The Alchemist* yang lucu itu, "that is our human condition". Salah satu kunci untuk memahami mengapa globalisasi berisi banyak ambivalensi adalah terlibatnya perkara kekuasaan.

Ambivalensi kekuasaan

Kita, generasi yang lahir dan dibesarkan di era Orde Baru (Orba), rupanya punya kebiasaan intelektual aneh tatkala membicarakan kekuasaan. Begitu mendengar kata "kekuasaan", kita sudah langsung melihatnya sebagai monster. Maklum, satu-satunya memori kita tentang kekuasaan adalah jenis kekuasaan Orba. Tidak heran, tatkala orang mengajukan fakta tentang globalisasi sebagai gejala perentangan kekuasaan perusahaan-perusahaan transnasional, kita buru-buru menganggapnya sebagai seorang yang mengeroyok dan menuding. Dalam republik analisis, itu merupakan satu bentuk keterpelesetan logika.

Pernyataan faktual adalah satu hal. Harus diapakan fakta itu adalah soal lain. Dan, di sinilah kita sampai pada kontroversi. Kita bisa berguru pada seluruh sejarah pemikiran dan pada akhirnya akan mendapati kesimpulan lugas bahwa dalam dunia manusia (bukan dunia jin), *"setiap pembicaraan mengenai kekuasaan senantiasa melibatkan pembicaraan tentang akuntabilitas"*. Sebabnya sederhana: karena, tidak ada jaminan apa pun bahwa kinerja kekuasaan (yang senantiasa melibatkan pelaku-pelaku konkret) akan otomatis membawa "berkat" bagi begitu banyak orang yang ada dalam orbit kinerja kekuasaan itu. Artinya, kinerja kekuasaan itu bisa juga membawa "kutuk", entah sebagai hasil langsung atau pun sampingan. Sekali lagi, soal ambivalensi hadir kembali. Bukankah ambivalensi itu pula yang telah melahirkan salah satu genius sejarah, yaitu gagasan "demokrasi"?

Ambivalensi yang dibawa perusahaan-perusahaan global juga dengan mudah dapat ditunjuk. Meminjam **Gabel** dan **Bruner**, "Dalam motif pokoknya bagi maksimalisasi laba, perusahaan-perusahaan itu membawa dampak positif (pajak, inovasi teknologi, lapangan kerja, modal, dan sebagainya) dan negatif (adu domba pemerintah-pemerintah,

korupsi, kesenjangan, degradasi ekologi, dan sebagainya)." Gabel dan Bruner tidak lagi memotret fakta statis, melainkan menunjuk implikasi etis. Apakah itu perlu? Andai saja globalisasi hanya melibatkan batu (berapa pun jumlahnya) dan bukan hidup manusia, tentulah hal itu tidak perlu!

Dalam karya klasiknya tentang transformasi bisnis dari bentuk perorangan ke sosok korporasi, *Power without Property* (1959), **Adolf A Berle Jr** sudah mengingatkan, "urusan akuntabilitas membuat gentar para pelaku bisnis". Mengapa gentar? Jawabnya lugas: karena, "apa yang dikira hanya urusan hak milik privat, ternyata sama sekali bukan sekadar urusan privat". Dengan ekspansi kekuasaan bisnis, **Berle** melanjutkan, "Proses publik dilakukan; otoritas yang sejajar dengan tanggung jawabnya telah tercipta; maka sebetuk tanggung jawab publik juga telah tercipta." Dan, Berle seperti mengantisipasi kondisi dewasa ini, "Kekuasaan itu telah terkonsentrasi tanpa proses perdebatan, tanpa persetujuan publik, tanpa pertimbangan publik tentang apa yang akan terjadi."

Sebagaimana diajukan para ekonom *mainstream*, seperti **Stiglitz**, yang akhirnya tidak tahan untuk tidak mengajukan kritik terhadap corak globalisasi dewasa ini, pokok seperti di atas diajukan bukan karena mereka antiglobalisasi. Bukan pula lantaran mereka anti-perusahaan transnasional. Pokok itu muncul secara tidak-bisa-tidak dari refleksi atas implikasi kinerja kekuasaan, entah itu kekuasaan bisnis atau pun kekuasaan pemerintah. Kecuali kita ingin kembali ke zaman batu!

Itulah mengapa bahkan dalam sebuah atlas yang diharapkan bebas bias, **Gabel dan Bruner** menyimpulkan, "*Mengingat dampak perusahaan-perusahaan multinasional yang sedemikian mendalam terhadap masyarakat dewasa ini lewat uang kampanye, pendiktean pengaruh, dan penyuaian secara langsung di berbagai kawasan dunia, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuasaan perusahaan-perusahaan besar itu dapat mengancam proses demokrasi.*"

Untuk membiarkan kecenderungan itu terjadi, tidaklah memerlukan genius apa pun. Untuk membuat kinerja kekuasaan perusahaan-perusahaan transnasional makin menjadi "berkat" bagi penduduk bumi, itu yang membutuhkan genius. Sampai sekarang tidak ada satu pun badan yang punya otoritas atas kinerja mereka.

Bukankah WTO adalah badan untuk itu? Sekali lagi, meminjam Gabel dan Bruner, WTO "justru melakukan regulasi pada pemerintah-pemerintah berkenaan dengan sikap terhadap perusahaan-perusahaan multinasional, tetapi belum ada satu pun instansi global yang mempunyai yurisdiksi atas kinerja perusahaan-perusahaan itu". Kompleks?

Suatu hari di bulan Desember 2003, ketika berada di sebuah kota di Jawa Tengah, saya mengajak keponakan saya yang duduk di kelas I SMU datang ke suatu universitas untuk mendengarkan ceramah tentang globalisasi. Ketika ia mendengar salah seorang pembicara bilang bahwa globalisasi adalah gejala yang lebih kompleks daripada yang dikira, ia berbisik ke telinga saya, "Om, kalau cuma bilang globalisasi itu kompleks, aku juga bisa!" Sambil mengelus kepalanya, dalam hati saya bilang kepada keponakan saya, "Iya, kita perlu klisé itu. Tetapi, jika kamu lalu menunjuk para pelakunya, mungkin kamu tidak akan disewa menjadi manajer Coca-Cola."

B Herry-Priyono Staf Pengajar Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta.

Sumber : (http://www.iwandarmansjah.web.id/attachment/at_898500-AtlasGlobalisasi.htm).

C. PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP KEHIDUPAN BANGSA DAN NEGARA

1. Globalisasi di Bidang Ekonomi

Abad 21, yang ditandai dengan globalisasi ekonomi. Hal ini merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Wujud nyata globalisasi bidang ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain terjadi dalam aspek-aspek berikut :

- a. **Aspek Produksi**, yaitu suatu perusahaan dapat memproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.
- b. **Aspek Pembiayaan**, yaitu suatu perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT. Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT. Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (*Build-Operate-Transfer*) bersama mitrausaha dari manca negara.
- c. **Aspek Tenaga Kerja**, yaitu suatu perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf professional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional dan atau buruh diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka *human movement* akan semakin mudah dan bebas.
- d. **Aspek Jaringan Informasi**, yaitu masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui : televisi, radio, media cetak, dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh, KFC, celana jeans Levi's, hamburger, dan sebagainya telah melanda pasar di mana-mana. Akibatnya, selera masyarakat dunia baik yang berdomisili di kota ataupun di desa menuju pada selera global.
- e. **Aspek Perdagangan**. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non tarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin ketat dan fair. Bahkan, transaksi menjadi semakin cepat karena "*less papers/documents*" dalam perdagangan, tetapi dapat mempergunakan jaringan teknologi telekomunikasi yang semakin canggih.

Dengan kegiatan bisnis korporasi (*bisnis corporate*) di atas, dapat dikatakan bahwa dampak globalisasi mengarah pada meningkatnya ketergantungan ekonomi antar negara melalui peningkatan volume dan keragaman transaksi antar negara (*cross-border capital flows*), pergerakan tenaga kerja (*human movement*) dan penyebaran teknologi informasi yang cepat. Sehingga secara sederhana dapat dikemukakan bahwa globalisasi secara hampir pasti telah merupakan salah satu kekuatan yang memberikan

pengaruh (berdampak positif) terhadap bangsa, masyarakat, kehidupan manusia, lingkungan kerja dan kegiatan *bisnis corporate* di Indonesia.

Kekuatan ekonomi global menyebabkan bisnis korporasi, termasuk BUMN, perlu melakukan tinjauan ulang terhadap struktur dan strategi usaha serta melandaskan strategi manajemennya dengan basis *entrepreneurship*, *cost efficiency* dan *competitive advantages*. Mencermati kondisi Indonesia dalam konteks ekonomi global, **Sjahrir** (2001) mengemukakan bahwa, suasana internal dan eksternal ekonomi Indonesia pada saat ini menunjukkan fenomena yang kurang menggembirakan. Untuk itu Bangsa Indonesia perlu melakukan prioritas dalam memulihkan ekonomi.

Jika hal ini tidak segera dilakukan, maka akan menimbulkan berbagai kosekuensi serius, antara lain:

- a. Semakin meningkatnya harga barang (*tingkat inflasi yang tinggi*),
- b. Jumlah pengangguran yang semakin membengkak (*apalagi pengangguran yang terjadi pada kaum intelektual*),
- c. Kemiskinan struktural yang semakin memilukan,
- d. Utang yang semakin menggunung baik pada pihak luar negeri maupun dalam negeri dan
- e. Pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah.

Berikut ini adalah beberapa contoh yang tercipta akibat/dampak globalisasi bidang ekonomi yaitu :

- a. Coca-cola atau Coke adalah sebuah merk minuman kola yang sangat populer. Dijual di berbagai restoran, toko dan mesin penjual di seluruh negara. Produsen dari minuman ini adalah *The Coca-Cola Company* yang mempunyai merk yang paling dikenal dan paling luas penjualannya.
- b. McDonald's Corporation adalah rangkaian rumah makan siap saji terbesar di dunia. Sampai pada tahun 2004, McDonald's memiliki 30.000 rumah makan di seluruh dunia dengan jumlah pengunjung rata-rata 17.000 orang per hari per rumah makan.
- c. Nokia Corporation adalah produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia. Kantor pusatnya berada di kota Espoo, Finlandia dan paling dikenal lewat produk-produk telepon selularnya.
- d. WTO (Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization*) adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan "aturan perdagangan" di antara anggotanya. Didirikan pada 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Pada tahun 2005 organisasi ini memiliki 149 negara anggota.

MASALAH GLOBALISASI BAGI PELAKU BISNIS

Masalah daya saing dalam pasar dunia yang mengglobal, merupakan isu kunci dan tantangan yang tidak ringan. Tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan saing yang tinggi niscaya produk suatu negara, termasuk produk Indonesia, tidak mampu menembus pasar internasional. Bahkan **masuknya produk impor** dapat mengancam posisi pasar domestik. Dengan kata lain, keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) merupakan faktor yang dominan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan daya saing dan membangun keunggulan kompetitif bagi produk Indonesia tidak dapat ditunda-tunda lagi dan sudah selayaknya menjadi perhatian berbagai kalangan, bukan saja bagi para pelaku bisnis itu sendiri tetapi juga bagi aparat birokrasi, berbagai organisasi dan anggota masyarakat yang merupakan lingkungan kerja dari *bisnis corporate*.

Bagi pelaku bisnis dengan tidak membedakan apakah swasta atau BUMN, peningkatan keunggulan saing dapat dibangun melalui tingkat kesadaran yang tinggi terhadap faktor *produktivitas, profesionalisme, kreativitas, perilaku efisiensi, kualitas produk dan layanan yang prima*, yang notabene merupakan ujung tombak dalam menghadapi *global competition*. Faktor produktivitas dan efisiensi menjadi komponen dasar dalam membangun harga produk yang bersaing. Tetapi harga murah bukan komponen satu-satunya. Kualitas produk dan layanan prima kepada pelanggan merupakan faktor dominan dalam menciptakan *customer satisfaction* dan memenuhi *customer's need*. Dalam konteks ini maka profesionalisme dan kreativitas menjadi penting untuk dapat memenuhi dan mengantisipasi keinginan para pelanggan.

Di luar lembaga bisnis, lingkungan usaha yang kompetitif harus dapat diciptakan. Makna penting dari daya saing, kemampuan saing dan lingkungan persaingan yang kondusif perlu ditransformasikan secara terus-menerus kepada masyarakat luas dan aparat pemerintah. Kesamaan persepsi bahwa persaingan akan memberikan keuntungan kepada masyarakat, yaitu dengan tersedianya berbagai alternatif pilihan jenis dan kualitas produk serta harga murah perlu dibangun. Demikian juga bagi aparat pemerintah, di mana dengan memahami arti dari persaingan maka perilaku entrepreneurship akan terbentuk dalam jiwa aparat pemerintah yang diwujudkan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Dengan cara ini diharapkan berbagai kelembagaan yang ada dan anggota masyarakat akan ikut memiliki tanggung jawab moral dalam memberikan dukungan terhadap terciptanya lingkungan persaingan yang sehat.

Dengan demikian bagi **kelompok yang optimistik**, arus globalisasi dapat disiasati **sebagai peluang** untuk melakukan lompatan transformatif yang progresif untuk melakukan ekspansi pasar. Sedangkan bagi kelompok **pesimistis**, memandang globalisasi sosial ekonomi sebagai ancaman dari bangsa lain, atau predator yang akan memangsa mereka yang lemah.

b. Globalisasi di Bidang Ideologi

Globalisasi saat ini bisa dikatakan sebagai bentuk penjajahan model baru yang bisa mengakibatkan keterpurukan ekonomi dan kemiskinan suatu bangsa yang tidak mampu mengimbangi pengaruh atau dampak globalisasi tersebut. Dan hal ini

kemungkinan besar bisa terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang. Sedangkan pengaruh globalisasi bisa menjanjikan kemakmuran pada negara-negara maju yang menginginkan tercapainya misi negara-negara tersebut dalam mengusung gaya **ideologi Kapitalis** dan **Liberalis**. Mereka dapat memasuki wilayah negara yang sedang berkembang dengan mengusung misi “kebebasan” di semua aspek yaitu politik, ekonomi dan sosial budaya.

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa pengaruh globalisasi di bidang ekonomi sangat menguntungkan negara-negara maju, karena dalam “upaya” memperbaiki ekonomi negara-negara berkembang, terdapat **unsur-unsur ideologi** yang disusupkan ke dalam suatu negara. Seperti Amerika Serikat yang berada di balik lembaga bantuan peminjaman seperti IMF dan Bank Dunia, jika ingin memberikan bantuan maka salah satu persyaratannya **harus menerima prinsip pasar bebas**. Hal ini bagi negara berkembang seperti negara Indonesia akan berakibat hanya dijadikan negara **koloni**, yaitu tidak lebih hanya sebagai pasar barang dan tempat pemasaran hasil industri oleh negara-negara maju.

Karena terdapat unsur keberpihakan pada negara-negara maju, maka pengaruh globalisasi bagi Indonesia menyebabkan keterpurukan ekonomi yang disebabkan ketidak-mampuan kita dalam bersaing secara cepat pada hasil-hasil produksi di tanah air. Demikian juga tingkat ketergantungan kita yang secara tidak sadar telah mengikat secara politik dengan mengusung prinsip-prinsip kapitalis dan pemikiran liberal.

c. Globalisasi di Bidang Politik

Ketika mendengar ungkapan “politik global” yang ada di benak kita adalah percaturan perebutan kekuasaan, hegemoni dan pengaruh global antara kekuatan-kekuatan besar di dunia. Percaturan tersebut kadang berupa proses politik yang melibatkan banyak negara, lembaga internasional dan kepentingan kelompok tertentu. Percaturan tersebut juga kadang terjadi dengan diwarnai pertempuran antara kekuatan militer yang menyimpan banyak kepentingan di belakangnya, seperti kita saksikan dalam pertempuran-pertempuran di Afghanistan dan Irak. Seperti sebuah negara, dunia global telah mempunyai dinamika politiknya sendiri.

Pengaruh globalisasi politik, menimbulkan begitu banyak kepentingan-kepentingan yang tidak lagi bisa dipenuhi kecuali melalui peran kekuatan global atau melibatkan unsur *suprastate*. Terkadang justru kepentingan sebuah negara sendiri tidak akan bisa terpenuhi kecuali dengan mengkondisikan eksternal sebagai *support* kepentingan domestik. Maka globalisasi politik tidak lain adalah pergulatan global dalam mewujudkan kepentingan para pelaku yang menjalankannya.

Para pelaku globalisasi di bidang politik adalah sebagai berikut :

- 1) Negara-negara besar dan negara-negara kecil, negara-negara maju dan negara-negara berkembang, negara-negara yang kuat dan yang lemah secara ekonomi, negara-negara yang kuat dan yang lemah secara militer, negara-negara yang berdiri sendiri atau yang bergabung dengan negara lain.
- 2) Organisasi-organisasi antar pemerintah, seperti ASEAN, SARC, NATO, *European Community* dan lain sebagainya.

- 3) Perusahaan internasional yang dikenal dengan *Multinational Corporations* (MNC). Perusahaan-perusahaan ini dengan modalnya yang besar dan bersifat *deteritorialis* meluaskan jaringannya ke segala penjuru dunia.
- 4) Perusahaan internasional atau transnasional yang non pemerintah, seperti Palang Merah Internasional, *Working Men's Association*, dan *International Women's League for Peace and Freedom*. Sedangkan yang bersifat **konvensional**, seperti Vatikan, Dewan Gereja-gereja Sedunia, Rabiyatul Islamiyah. Untuk yang **modern**, antara lain: *Amnesty International*, *Green-Peace International*, *World Conference on Religion and Peace*, *World Federation of United Nations Associations*, *Trans-Parency International*, *Worlwatch*, *Human Rights Watch*, dan *Refugee International*.

d. Globalisasi di Bidang Sosial-Budaya

Paska jatuhnya kekuasaan orde baru yang kemudian berubah menjadi rezim yang disebut sebagai “era reformasi”, kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia cenderung mengalami krisis sosial yang mengarah pada disintegrasi. Krisis moneter dan ekonomi yang terjadi sejak akhir 1997, telah mengakibatkan munculnya berbagai krisis lanjutan atau disebut “krisis multidimensi” yang mencakup krisis politik, kepercayaan, hukum, sosio-budaya dan sebagainya dalam kehidupan berbangsa dan negara.

Salah satu krisis multidimensi dalam bidang sosial budaya, yaitu meluasnya berbagai modus disorientasi dan dislokasi pada banyak kalangan masyarakat kita. Misalnya, disintegrasi sosial-politik yang bersumber pada euforia kebebasan yang nyaris kebablasan; lenyapnya kesabaran sosial dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga **mudah mengamuk** dan melakukan berbagai tindakan **kekerasan dan anarki**; merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral dan kesantunan sosial; semakin meluasnya penyebaran narkoba serta penyakit-penyakit sosial lain; berlanjutnya konflik dan kekerasan yang bernuansa politis, etnis dan agama, seperti yang pernah terjadi di berbagai wilayah Aceh, Kalimantan Barat dan Tengah, Maluku dan Sulawesi tengah.

Beberapa indikasi yang dapat kita rasakan akibat pengaruh globalisasi sosial budaya, adalah sebagai berikut :

- 1) Disorientasi, dislokasi, atau krisis sosial-budaya di kalangan masyarakat yang merebak dengan kian meningkatnya *penetrasi* dan *ekspansi budaya Barat* -- khususnya Amerika -- yang semakin sulit dibendung.
- 2) Berbagai ekspresi sosial budaya “*alien*” (asing), yang sebenarnya tidak memiliki basis dan preseden kulturalnya, semakin menyebar di dalam masyarakat sehingga muncul kecenderungan-kecenderungan “*gaya-hidup*” baru yang tidak kondusif bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.
- 3) Semakin merebaknya budaya “*McDonald-isasi*”, meluasnya budaya telenovela yang menyebarkan kepermisifan, kekerasan dan hedonisme, mewabahnya *MTV-isasi*, *Valentine's Day* dan kini juga *From's Night* di kalangan remaja. Meminjam ungkapan **Edward Said**, gejala itu tidak lain adalah *neo cultural imperialism*, menggantikan imperialisme klasik yang terkandung dalam orientalisme.

Dari berbagai kecenderungan tersebut, orang bisa menyaksikan kemunculan kultur *hybrid* (budaya gado-gado tanpa identitas), di Indonesia dewasa ini. Pada satu sisi, kemunculan budaya *hybrid* tampaknya tidak terelakkan, khususnya karena pengaruh globalisasi yang semakin sulit dihindari. Beberapa sisi negatif dari munculnya budaya *hybrid* antara lain :

- dapat mengakibatkan erosi budaya.
- lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal.
- kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jatidiri.
- hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme.
- cenderung pragmatisme dan maunya serba instan.

Multikulturalisme merupakan sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal dengan tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain. Itu penting kita pahami bersama dalam kehidupan masyarakat multikultural seperti bangsa Indonesia. Jika tidak, mungkin akan selalu terjadi konflik akibat ketidaksaling pengertian dan pemahaman terhadap realitas multikultural tersebut.

e. Globalisasi di Bidang Hankam

Pengaruh globalisasi di bidang Hankam sangat nampak terutama pada industri-industri pertahanan sebagai tatanan segenap potensi industri nasional baik milik pemerintah/swasta, yang mampu secara sendiri atau kelompok, untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan Hankam serta jasa pemeliharaan guna kebutuhan pertahanan keamanan negara.

Negara-negara industri persenjataan seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Cina dan sebagainya, telah berupaya selalu memperbaharui jenis, bentuk dan kemampuannya untuk kepentingan pertahanan negara. Tidak sedikit negara-negara lain seperti Iran, Israel, India, Pakistan, Korea Utara dan sebagainya juga telah berupaya untuk membuat persenjataan-persenjataan yang semakin disempurnakan, bahkan belakangan muncul isu-isu senjata nuklir yang masih menjadi polemik.

Bidang-bidang industri pertahanan dan keamanan khususnya negara Indonesia, telah berupaya melakukan kerja sama dengan negara-negara lain baik untuk kepentingan TNI Darat, Laut, Udara maupun Kepolisian Negara sebagai berikut :

- 1) Sistem senjata meliputi *platform* (udara, laut dan darat), senjata dan bahan peledak dan *propellant*.
- 2) Sistem Komando, Kendali, Komunikasi dan Informasi (K3I).
- 3) Untuk Platform Udara, dalam melakukan pengalihan teknologi atas dasar lisensi, PT. IPTN telah memproduksi platform pesawat bersayap tetap NC212 di bawah lisensi dari *Construiones Aeronauticas SA (CASA)*, Spanyol; *platform Helikopter* tipe NBO-105 di bawah lisensi *Meserschmitt-Bolkow-Blohm (MBB)*, Jerman Barat; Helikopter Puma NSA-330 dan Super Puma NAS-330 di bawah lisensi *Aerospatiale, Perancis*; helikopter NBell-412 lisensi dari *Bell Textorn Inc, USA*; dan Helikopter NBK 117 lisensi dari MBB-Kawasaki.
- 4) Bentuk kerjasama lain dalam bidang Hankam adalah *offset* dengan General Dynamics USA sehubungan dengan pengadaan pesawat jet tempur F16. Demikian juga program *offset* dengan *British Aerospace Co* dalam pengadaan rapier serta kerjasama dengan

Boeing dan Fokker dalam menyediakan bagian pesawat untuk produksi Boeing dan Fokker yang dikaitkan dengan pembelian pesawat-pesawat oleh Garuda dan Merpati.

f. Globalisasi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi dewasa ini, telah mengalami perkembangan sedemikian pesat. Kemajuan di bidang inilah yang **paling cepat** memunculkan terbentuknya era global yang antar negara seakan-akan tidak ada lagi batas-batas teritorial. **Globalisasi** menunjukkan perubahan besar dalam masyarakat dunia. Apa yang ditunjukkan bukan sesuatu yang mengada-ada. Bukan sekadar soal kita menambahkan perlengkapan modern, seperti video, fashion, televisi, parabola, komputer dalam cara hidup. Kita hidup di dalam dunia yang sedang mengalami transformasi yang luar biasa sehingga pengaruhnya hampir melanda setiap aspek dari kehidupan. Kita didorong masuk ke dalam tatanan global yang tidak sepenuhnya dipahami oleh siapa pun, namun dampaknya bisa kita rasakan.

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadi sebuah fenomena yang selalu menarik untuk diamati. Teknologi komunikasi dan informasi merupakan perangkat teknologi yang membantu manusia dalam berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. **Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi** menjadikan manusia dalam berhubungan dengan pihak lain seakan tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Kapan-pun dan di mana-pun manusia dengan perangkat teknologi tersebut bisa menjalin hubungan, mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi kepada orang lain. Teknologi komunikasi informasi telah memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup manusia. Beberapa perangkat teknologi komunikasi informasi yang ada sekarang, misalnya :

- a. Media cetak, seperti koran, tabloid dan majalah
- b. Media audio, seperti radio, tape, compact disk
- c. Media audio visual, seperti televisi, TV kabel, internet,
- d. Komputer, perangkat infra merah, telepon, handphone, mobile phone, LCD, kamera, laptop.

Di negara-negara maju, orang telah akrab dengan penggunaan berbagai perangkat teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Kemudahan yang didapatkan dari penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang di negara-negara maju, seperti efisiensi, efektifitas dan rasionalitas. Contohnya adalah penggunaan komputer multimedia yang telah terhubung dengan jaringan internet. Dengan hanya berada di depan komputer orang bisa melakukan berbagai aktivitas, seperti melakukan pembicaraan dengan orang lain, mengirim surat, melihat televisi, membaca berbagai berita, mencari informasi, memberikan informasi, serta melakukan transaksi (pembelian, pembayaran dan penjualan). Apa yang dahulu tidak terbayang bisa dilakukan, sekarang ini dengan kemajuan teknologi komunikasi informasi orang dapat melakukannya.

D. SIKAP TERHADAP PENGARUH DAN IMPLIKASI GLOBALISASI TERHADAP BANGSA DAN NEGARA

Sesungguhnya dengan globalisasi dapat, kita dapat mengambil peranan yang lebih besar pada prakarsa dan kreativitas warga masyarakat melalui berbagai infrastruktur teknologi informasi dan transportasi, ekonomi, sosial budaya, politik atau elemen organisasi masyarakat. Setiap warga negara berkewajiban dan sekaligus merupakan suatu kehormatan apabila mampu menciptakan motivasi, tatanan, kondisi dan peluang yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan prakarsa masyarakat itu sendiri.

Dalam era globalisasi dewasa ini, mengharuskan kita untuk bersikap arif dan mampu merumuskan serta mengaktualisasikan kembali nilai-nilai kebangsaan yang tangguh dalam berinteraksi terhadap tatanan dunia luar dengan tetap berpijak pada jati diri bangsa, serta menyegarkan dan memperluas makna pemahaman kebangsaan kita dengan mengurangi berbagai dampak negatif yang akan timbul. Sudah saatnya, era globalisasi kita maknai dalam arti yang positif antara lain tumbuhnya persaingan yang sehat, tingkat kompetisi yang tinggi, harus serba cepat, dan sebagainya. Beberapa sikap yang perlu kita miliki dalam rangka menghadapi pengaruh globalisasi dan implikasinya terhadap bangsa dan negara antara lain sebagai berikut :

1. Memiliki Wawasan Global

Khusus globalisasi dan perkembangan global lainnya, perkembangan ini mulai menampakkan pengaruhnya berupa perhatian dan apresiasi kita **yang kadang berlebihan** terhadap berbagai wawasan dan perikehidupan global, antara lain :

a. Budaya Global.

Perilaku, nilai, dan gaya hidup yang dibawa masuk arus informasi global diterima dengan mudah, meskipun ada yang tidak sesuai dengan nilai sosial budaya sendiri. Munculnya manusia global, orang yang hidup di Indonesia tetapi lebih merasa sebagai warga komunitas global dan sebagainya.

b. Konsep Global.

Timbulnya wacana atau diskusi terhadap permasalahan konseptual yang ditimbulkan oleh globalisasi, misalnya mengenai konsep negara-bangsa (*nation state*), relevansi ideologi bagi negara, primordialisme baru, liberalisasi, dan sebagainya.

c. Pendangkalan wawasan dan kehidupan demokrasi.

Kompetisi media massa global melahirkan demokrasi “instant” dan pendangkalan wawasan, dengan proses analisis *realtime* yang langsung jadi dari tempat peristiwa yang mengutamakan nilai “gigit” (*soundbites*), rentang perhatian (*span of attention*) yang singkat, serta kultur *pop global*. Pendangkalan ini menular ke dalam masyarakat yang tidak sempat melihat perspektif yang wajar sebagai akibat dari gerak dinamika yang sangat tinggi.

d. Isyu Global.

Hak Asasi Manusia, masalah lingkungan global, dan isyu yang dikembangkan di masyarakat yang menguasai lalu-lintas informasi global, misalnya: hak aborsi wanita, kohabitasi, keluarga sama jenis, dan sebagainya.

e. Politik global.

Perlu diingat, bahwa adanya diskusi dan perhatian tersebut tentu dengan tidak sendirinya berarti tidak baik. Dengan pengkajian dan telaahan yang lebih dalam dan terbuka, dengan memakai bahasa yang sama, isu global dapat dibahas dalam berbagai forum seminar, pengkajian dan diskusi secara lugas. Hal ini misalnya dapat dilakukan terhadap wawasan tentang keterbukaan, hak asasi manusia atau wawasan lingkungan.

Dalam hal wawasan lingkungan hidup, misalnya, banyak yang berpendapat bahwa pandangan ini diakibatkan oleh tekanan dan pengaruh internasional. Meskipun ada di antaranya yang datang dari luar (seperti konsep *global commons*). Khususnya di Indonesia, bahwa sebenarnya kebanyakan konsep lingkungan sudah sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.. Perhatikan umpamanya, prinsip-prinsip dibalik konsep Pembangunan Berkelanjutan, ekosistem, daya dukung alam, keanekaragaman hayati atau keterkaitan penduduk dengan lingkungan. Semuanya beranjak dari konsep ekosistem secara holistik: seluruh bagian saling terkait dan tergantung, berhubungan secara serasi, selaras dan seimbang.

2. Memahami Era Globalisasi dan Hubungan Interdependensi Ekonomi

Perkembangan baru bidang ekonomi, telah menciptakan suasana serta pola hubungan finansial, perdagangan, produksi dan berbagai hubungan ekonomi lain yang sangat berbeda dengan yang dikenal atau dilaksanakan sebelumnya ini. Hal yang penting untuk kita fahami, bahwa segala aktivitas kegiatan ekonomi dan operasi dunia usaha tidak lagi dapat diidentifikasi sebagai kegiatan nasional, akan tetapi bersifat transnasional atau global.

Berbagai perkembangan baru yang menggambarkan kecenderungan globalisasi atau transnasionalisasi dalam perekonomian dapat dilukiskan sebagai berikut :

- a. **Dalam hubungan finansial**, semenjak pertengahan dasawarsa tujuh puluhan telah terjadi proses globalisasi keuangan dalam bentuk internasionalisasi dan mungkin lebih tepat **transionalisasi keuangan**, yaitu meluasnya operasi lembaga keuangan sehingga tidak terbatas pada suatu negara atau wilayahnya, akan tetapi seluruh dunia.
- b. Gejala **sekuritisasi** atau proses membaurnya operasi bank-bank komersial dengan lembaga-lembaga keuangan sekuriti serta **inovasi** baru dalam operasi keuangan, berupa perluasan jasa uang sehingga mencakup berbagai kegiatan di luar yang secara tradisional dilakukan di pasar uang.
- c. **Dalam kegiatan produksi**, kecenderungan globalisasi nampak dari proses pembuatan produk akhir yang komponen-komponennya dihasilkan diberbagai negara, sehingga hasil akhirnya merupakan gabungan dari produk yang berasal dari berbagai negara tersebut.
- d. **Perusahaan multinasional**, bukan lagi yang menghasilkan suatu produk dengan pasokan bahan yang datang dari perusahaan-perusahaan anaknya, akan tetapi masing-masing perusahaan nasional menghasilkan komponen yang setelah digabungkan dengan komponen-komponen lain yang dihasilkan perusahaan di negar-negara lain, akhirnya menjadi satu barang jadi.

- e. **Dalam perkembangan investasi**, pada berbagai kegiatan produksi juga bersifat transnasional. Perdagangan internasional makin mengikuti investasi, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa perdagangan merupakan fungsi dari investasi.
- f. **Perkembangan di Timur Tengah**, suatu reaksi yang menyatukan negara-negara lain untuk mengambil tindakan embargo ekonomi dan penyerangan terhadap Irak yang oleh resolusi PBB dianggap memiliki senjata pemusnah masal. Hal ini, merupakan perkembangan baru yang merupakan globalisasi politik, yang dimotori Amerika Serikat dan sekutunya.
- g. **Perkembangan teknologi**, terutama teknologi komunikasi terutama setelah ditemukannya kabel dari “*fiber optic*” yang menggantikan tembaga sebagai sarana komunikasi dengan efisiensi yang berlipat ganda, telah menimbulkan revolusi dalam hubungan komunikasi karena mampu mentransfer informasi jauh lebih cepat dan akurat serta kapasitas yang berlipat besarnya.

Semua perubahan-perubahan tersebut di atas, telah memudahkan masyarakat dunia memindahkan uang, data dan informasi ke seluruh penjuru dunia dengan lebih mudah dan murah. Masyarakat dapat mengikuti peristiwa penting di dunia dengan mudah, bagaimana tembok Berlin runtuh, bagaimana krisis hubungan RRC dan Jepang terjadi, krisis Timur Tengah, gempa bumi dan gelombang Tsunami di Aceh, dan sebagainya. Globalisasi ekonomi telah menimbulkan gejala baru, yaitu sifat hubungan ekonomi antar bangsa-bangsa yang lebih ditandai oleh saling ketergantungan atau interdependensi yang makin menguat. Kecenderungan timbulnya hubungan interdependensi ekonomi ini tidak saja antar negara-negara maju yang sudah lama terjadi, akan tetapi juga antar negara-negara berkembang serta antara negara-negara berkembang dan maju.

Dinamika Ekonomi Global

Dalam suasana terjadinya perubahan sangat cepat dan mendasar di dunia, bidang ekonomi, politik dan yang lain, maka terjadi pula perubahan pada pola hubungan ekonomi antar bangsa-bangsa yang akhirnya mempengaruhi perekonomian nasional. Berbagai pola hubungan ekonomi telah mengalami perubahan struktural. Penggunaan bahan baku atau material sangat efisien juga berarti penggunaan sumber energi yang efisien.

Dua pilar sangat penting dalam perekonomian, yaitu sumber bahan baku dan energi, yang mengalami perubahan mendasar dalam penggunaannya – atau terjadinya konservasi dan penghematan luar biasa – telah sangat merubah pola perkembangannya industri dan investasi di dunia. Perkembangan-perkembangan tersebut telah pula mempengaruhi langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan oleh negara-negara, baik sendiri-sendiri maupun dengan kerjasama dalam berbagai kelompok.

Kebijaksanaan makro ekonomi suatu negara, betapapun besar dan kuasanya, tidak mungkin dilaksanakan dengan berhasil tanpa kerja sama dengan negara-negara lain. Timbulnya forum “*Economic Summit*”. Pertemuan antar kepala negara atau pemerintahan negara-negara besar dalam kelompok G-7 untuk membahas permasalahan ekonomi dunia dan mengkoordinasikan penanggulangannya, yang dimulai sejak pertengahan 1970-an yang lalu mencerminkan hal ini.

Amerika Serikat misalnya, tidak mungkin dapat melakukan kebijaksanaan moneter untuk mempertahankan nilai dollarnya, tanpa minta kerja sama dengan negara-negara besar terutama Jepang dan Jerman Barat dalam hal ini agar mereka membantunya. Rekomendasi dalam berbagai “*Economic Summit*” juga menghendaki adanya kerjasama atau koordinasi dalam pengelolaan kebijaksanaan ekonomi makro negara-negara tersebut.

3. Memahami Perkembangan Dunia Yang Sangat Cepat

Kecenderung globalisasi yang menimbulkan hubungan interdependensi antar perekonomian negara-negara di dunia, harus kita pahami bahwa hal ini akan dibarengi dengan berbagai perkembangan sangat cepat dan juga bersifat struktural. Beberapa indikator perubahan dan perkembangan dunia yang sangat cepat, antara lain :

- a. Banyaknya perekonomian di dunia yang **mendorong bekerjanya mekanisme pasar** dan persaingan dengan mengurangi campur tangan langsung negara atau pemerintah dalam kegiatan ekonomi nasional. Kecenderungan ini sering disebutkan sebagai penemuan kembali ekonomi pasar, yang dilaksanakan di negara-negara atau perekonomian industri baru (*newly industrializing countries* atau NICs dan *newly industrializing economies* atau NIEs), negara-negara berkembang, termasuk negara kita, dan yang banyak mendapat sorotan, di negara-negara sosialis atau komunis, dengan “glasnost” dan “perestroikannya”.
- b. Terdapat perkembangan penting di Eropa Barat dengan **program Pasar Tunggal Eropa** pada tahun 1992. Dengan program yang sangat luas ini, kita dapat memaklumi bahwa Eropa akan jauh lebih banyak memperhatikan masalah intern dan lebih bersikap *introvertif*. Yang jelas sejak dicanangkannya penyatuan pasar Eropa, kepercayaan Eropa menjadi pulih, istilah “Euroclerosis” menjadi hilang dan penanaman modal di Eropa baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh masyarakat luar Eropa, makin meningkat.
- c. Amerika Serikat yang 50 tahun lalu menunjukkan keterbukaan dalam sikapnya terhadap perdagangan internasional, mengalami perubahan kearah proteksionisme, terutama setelah AS mulai kehilangan daya saingnya menghadapi Jepang. Kecenderungan ini nampak jelas dari perundang-undangan yang dikeluarkan dalam perdagangan maupun berbagai rancangan undang-undang yang diajukan di *Congress*.
- d. Negara Jepang telah memperlihatkan kemampuannya sebagai kekuatan utama di bidang perdagangan. Baru-baru ini MITI Jepang mengeluarkan dokumen yang menunjukkan programnya untuk menjadikan ekonomi Jepang berperan sebagai pemimpin ekonomi dunia dalam tahun 2000-an sebagaimana Amerika Serikat melakukan hal ini semenjak berakhirnya Perang Dunia II.
- e. Timbulnya gejala baru kearah pembentukan “*free trade area*” diberbagai wilayah seperti Amerika Utara dan Amerika Serikat dengan Kanada, kemudian dengan Meksiko dan wilayah Australia-NewZealand, dan di negara-negara ASEAN. Bila masing-masing “*free trade area*” ini akan menjadi tertutup pula maka kita menghadapi bahaya *fragmentasi* atau proteksionisme.
- f. Transformasi perekonomian yang terjadi di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara, serta perkembangan NICs baik di Asia maupun di kawasan lain. Ekonomi kawasan Asia Pasifik berkembang sangat pesat yang dipelopori oleh RRC, Taiwan dan Korea Selatan, demikian pula perdagangan antar negara-negara di kawasan ini. Kecenderungan ini akan berlanjut di masa depan.

Dengan peningkatan hubungan dagang, investasi dan ekonomi antar negara-negara di berbagai kawasan, seolah-olah ada suatu integrasi ekonomi di kawasan tersebut. Di lain pihak ketergantungan kebanyakan negara pada pasar tertentu (AS dan Jepang) yang dapat menimbulkan hubungan bilateral yang berpotensi menimbulkan friksi, seperti defisit neraca perdangan yang berkelanjutan.

4. Memanfaatkan Globalisasi Untuk Pembangunan

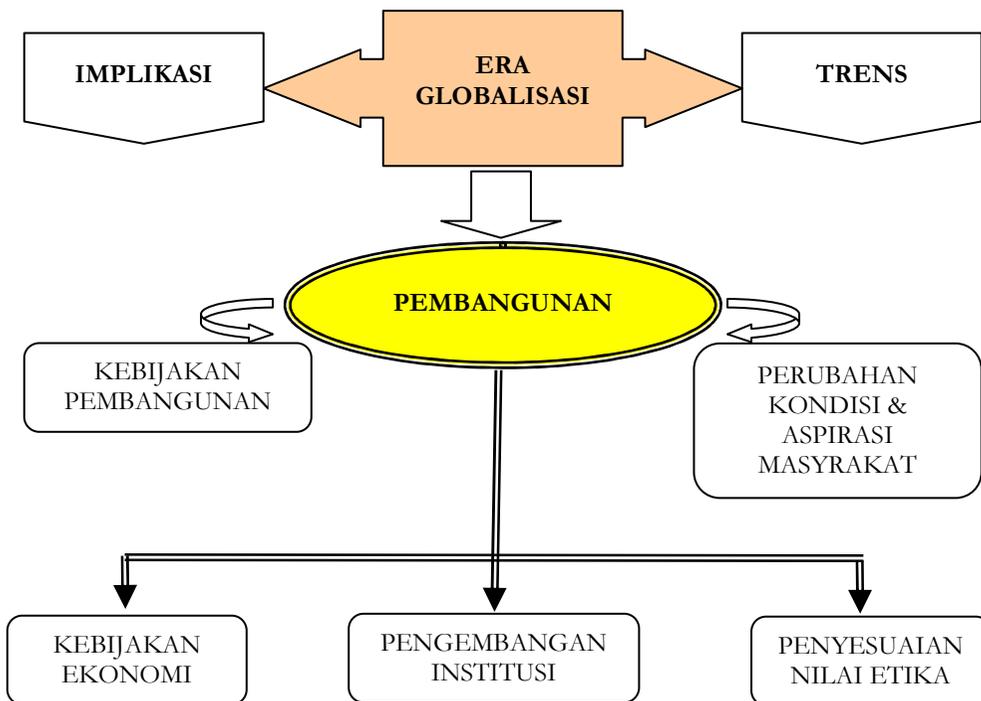
Pembangunan di negara-negara berkembang pada umumnya, sekarang ini berlangsung dalam keadaan dunia yang sedang mengalami proses globalisasi. Hal ini dengan akibat bahwa proses pembangunan negara berkembang tidak bisa dilaksanakan terisolasi dari proses globalisasi. Oleh karena itu, beberapa kerangka kebijaksanaan yang berlaku dimasa perang dingin, kini ditahun sembilan puluhan dan ke masa depan tidak relevan lagi.

Beberapa negara berkembang, seperti Indonesia dan negara Asia Timur serta beberapa negara Amerika Selatan lainnya sudah menempuh proses pembangunan yang cukup kencang selama dasawarsa lalu dan karena itu mengalami perubahan struktur ekonomi dan sosial yang cukup besar. Perubahan yang berlangsung ini menumbuhkan kekuatan-kekuatan sosial baru yang memerlukan penanganan dan kerangka kebijaksanaan pembangunan yang baru pula. Tidak lagi bisa ditempuh “jalan kemarin” atau pendekatan “*business as usual*”.

Sehingga setidaknya terdapat dua faktor yang mempengaruhi kerangka kebijaksanaan yang membedakannya dengan kebijakan lalu, yaitu :

- Proses globalisasi yang gencar berlangsung di seantero dunia sehingga perlu diperhitungkan dan dimanfaatkan dalam menarik kebijaksanaan pembangunan nasional; dan
- Perubahan kondisi dan aspirasi masyarakat yang merubah dan meningkat sebagai hasil pembangunan dasawarsa-dasawarsa lalu.

Dengan memperhatikan dua faktor ini perlu dikaji implikasinya pada keperluan melakukan penyesuaian pada beberapa bidang yang strategis. Perhatikan bagan di bawah ini !



a. Penyesuaian Kebijakan Ekonomi

Perlu ditekankan bahwa stabilitas terutama yang terkait dengan bidang ekonomi, khususnya dalam ukuran laju inflasi, tetap perlu dipertahankan oleh karena globalisasi ekonomi justru menghendaki terpeliharanya stabilitas ekonomi. Namun dalam penerapannya tidak cukup lagi ditempuh kebijaksanaan ekonomi yang diandalkan pada kebijaksanaan moneter saja. Kebijaksanaan stabilisasi ekonomi inipun memerlukan penyesuaian dengan menekankan sekarang lebih banyak pada kebijaksanaan sektor riil mengurangi hambatan arus dan produksi barang serta jasa.

Dalam menanggapi proses globalisasi ekonomi dengan masuknya saingan menghadapi kelompok-kelompok ekonomi kuat, perlu ada ikhtiar khusus memberdayakan kekuatan ekonomi lemah. Paling tidak diusahakan agar “medan juang” (*playing field*) setingkat dalam dunia kompetisi global.

Sudut penglihatan ini membawa akibat bahwa ada sikap berpihak dalam menarik kebijaksanaan pembangunan. Dalam ekonomi pasar yang didorong oleh proses globalisasi ekonomi, sangat penting bahwa Pemerintah secara eksplisit menunjukkan sikap berpihak pada kelompok lemah dan rentan dalam kebijaksanaan pembangunan. Ini berarti bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan adalah “ekonomi pasar dengan pencernaan”.

Proses pembangunan yang berlangsung secara global sekarang ini menunjukkan sifat “pertumbuhan tanpa perluasan lapangan kerja” (*jobless growth*) dalam mengisi pembangunan negara berkembang ini berarti bahwa perombakan struktur ekonomi dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri sungguhpun penting tidaklah cukup. Yang diperlukan sebagai tambahan adalah meningkatkan kemampuan industri-berpengetahuan (*knowledge based industry*).

b. Penyesuaian Pengembangan Institusi

Penyesuaian kebijakan tentang pembangunan ekonomi, memerlukan penyesuaian pengembangan institusi. Pertama adalah pengembangan institusi aparatur Pemerintah. Dalam sistem ekonomi pasar dengan perencanaan, maka peranan pemerintah adalah penting. Namun sifat orientasi pemerintahan perlu mengalami penyesuaian :

- 1) Memberi pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan menjadi sifat memberdayakan masyarakat melayaninya diri sendiri.
- 2) Kegiatan Pemerintah beralih dari pelaksanaan (*excution*) menjadi pembimbingan (*guidance*).
- 3) Pola kepemimpinan yang ditampuh tidak lagi sentralisasi tetapi desentralisasi baik ke daerah maupun kekelompok masyarakat.
- 4) Sikap kerja yang beralih dari tindak repressif kearah preventif;
- 5) Visi penglihatan untuk melihat proses pembangunan tidak dalam jangka pendek (*short tern vision*) tetapi dalam jangka panjang (*long tern vision*).

Masyarakat plural dan beranekaragam (*pluralisme*) adalah ciri masyarakat global. Bangsa Indonesia bersyukur bahwa secara politis kita sudah menganut “Bhineka Tunggal Ika”, sehingga keanekaragaman dalam diri masyarakat seyogianya tidak perlu menjadi masalah. Oleh karena itu tumbuh-kembangnya demokrasi tidak lagi cara

kekuasaan yang dimiliki berbagai pihak, termasuk pemerintah, digunakan dalam mengembangkan sumberdaya alam, ekonomi dan sosial dalam proses pembangunan. **Globalisasi ekonomi** mengakibatkan bahwa modal menjadi barang langka. Lebih-lebih dengan kesempatan pembangunan yang terbuka sekarang akibat berakhirnya perang dingin. Maka permintaan akan modal melebihi pemasokan modal. Modal “tidak mengenal bendera nasional” dan akan memasuki sektor dan negara yang menghasilkan keuntungan.

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERGERAKAN MODAL

Untuk dapat menarik modal para investor, diperlukan kondisi dan iklim pemerintahan yang mencerminkan *Governance* yang baik. Karena dalam dunia bisnis harus berlaku oportunitas yang adil bagi berbagai pihak dengan “medan juang” yang setingkat (*level playing field*).

Ini juga berarti bahwa berbagai hambatan yang mengurangi tumbuhnya oportunitas yang adil harus dihapus. Dalam hubungan ini maka integrasi horizontal dan integrasi vertikal antara berbagai cabang usaha disatu tangan bisnis harus dihindari. Begitu pula aksesibilitas pada dana pembiayaan, modal kredit, teknologi, fasilitas pemasaran kebadan Usaha Milik Negara dan Pemerintah, tender terbuka dan yang serupa perlu ditingkatkan.

Sikap berpihak pada pengusaha ekonomi lemah harus ditegakkan di lingkungan aparaturnya Pemerintah dan BUMN. Maka dalam kerangka luas inilah harus dinilai keperluan untuk de-birokratitasi, de-sentralisasi, de-monopolisasi dan de-lisensi. Dan masalah “bisnis anak pejabat” seyogianya diletakkan tidak pada issue legitimasi boleh tidaknya anak pejabat berbisnis, tetapi pada bingkai sikap berpihak aparaturnya Pemerintah dan BUMN pada pengusaha ekonomi lemah dalam kerangka penegakkan membuka oportunitas yang adil dalam berbisnis.

c. Penyesuaian Nilai Etika

Berbagai penyesuaian kebijaksanaan ekonomi dan pengembangan institusi ini memerlukan pengembangan nilai etika. Dari berbagai nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia perlu diangkat secara eksplisit nilai-nilai sebagai berikut :

- 1) Penegakkan martabat kemanusiaan dengan pokok menghormati hidup (*respect for life*). Hidup dan kehidupan bermartabat kemanusiaan inilah perlu dihormati.
- 2) Menumbuhkan kebebasan sebagai ciri manusia beradab dan mencakup kebebasan mengaktualisasikan diri dengan identitas sendiri dan atas kerangka acuan sendiri : kebebasan beragama, menerima dan memilih informasi, kebebasan berfikir dan mengungkapkan pendapat, kebebasan hidup bermasyarakat menurut kerangka acuan masyarakat itu sendiri.; kebebasan berbangsa , bernegara, dan bertanah air yang tegak sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain.
- 3) Menegakkan keadilan yang diwujudkan melalui hukum, sehingga peraturan perundang-undangan mencerminkan rasa adil yang hidup dalam masyarakat.
- 4) Toleransi yang menghormati hak berbeda pendapat, berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, berbeda kelompok. Hak untuk berbeda dalam semangat bersatu.

- 5) Solideritas sosial yang menumbuhkan sikap keadilan sosial dan terwujud dalam jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan yang menurun dan kesenjangan di atas garis kemiskinan mengecil.

Demikian langkah-langkah penyesuaian yang perlu diusahakan dalam menanggapi proses globalisasi dan proses pembangunan yang merubah struktur ekonomi dan masyarakat Indonesia dari masyarakat agraris pertanian ke arah masyarakat industri. Langkah-langkah penyesuaian ini tidak berlangsung otomatis, tetapi perlu ditumbuh kembangkan.

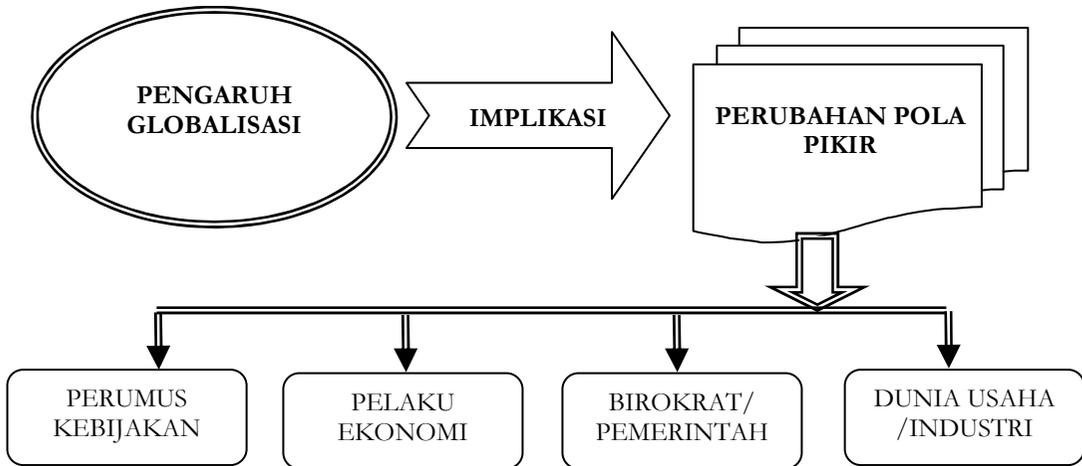
5. Implikasi Globalisasi Terhadap Bangsa dan Negara

Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global dengan ideologi Pancasila yang terbuka dan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya serta hankam yang dinamis, dalam melaksanakan pembangunan dari tahun ke tahun, merasakan dampak dari perubahan-perubahan dunia yang cepat dan mendasar. Hal ini tentu saja membawa implikasi pada perencanaan dan pengelolaan pembangunan nasional secara keseluruhan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akan tetapi, perubahan-perubahan itu sendiri akan berpengaruh pada perkembangan terhadap teknologi informasi dan komunikasi, ilmu pengetahuan, para cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu, pelaku ekonomi dalam dunia usaha maupun purumus kebijakan di tingkat nasional. Semua perubahan-perubahan tersebut akan berimplikasi pada hal-hal antara lain sebagai berikut :

- a. *Perumus kebijakan di tingkat nasional*, bahwa perubahan yang cepat dan kecenderungan tidak menentu serta makin ketatnya persaingan atau kompetisi di berbagai bidang kehidupan, menuntut peningkatan strategi dan langkah-langkah operasional untuk penciptaan iklim bagi dunia usaha, aparat birokrasi, perangkat hukum, infrastruktur, penciptaan sumber daya manusia dan sebagainya yang terus makin meningkat efisiensi dan daya saingnya.
- b. *Pelaku ekonomi*, bahwa dalam dasawarsa dua ribuan daya saing ekonomi nasional mulai meningkat, kemampuan produksi dan ekspor makin membesar. Untuk itu, diperlukan segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pasar bagi hasil produksi nasional, baik lewat perbaikan sistim perdagangan internasional dalam kerangka multilateral, regional, dan bilateral.
- c. *Pemerintah*, yaitu baik pemerintah pusat maupun daerah diharapkan makin memainkan peran sebagai fasilitator, pemberi dorongan dan bimbingan kepada para cendekiawan, tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu serta dunia usaha untuk terus meningkatkan daya saing dalam skala nasional dan global. Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi harus dilanjutkan, tanpa menghilangkan campur tangan yang diperlukan, khususnya yang memberikan arah serta mendorong prakarsa, kreativitas dan partisipasi masyarakat.
- d. *Bagi dunia usaha*, dituntut untuk lebih luwes, lebih sensitif pada tuntutan pasar dan lebih jeli mempelajari peluang-peluang yang terbuka di pasar serta menerus meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaannya. Khusus pada globalisasi ekonomi, menuntut kelincahan dunia usaha dalam keja sama antar para pelakunya dan dengan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di pasar dunia.

Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan di bawah ini !



Perkembangan yang cepat sebagai pengaruh globalisasi, telah membawa implikasi pada teori atau pendekatan diberbagai bidang dan aspek kehidupan. Oleh sebab itu, globalisasi dengan segala implikasinya, hendaknya terus kita upayakan dalam kerangka membangun sebuah bangsa dan negara yang mampu berlaku efisien, efektif dan memiliki daya saing global.

Agar Tak Gamang Globalisasi
Oleh : IVAN A HADAR

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpesan agar bangsa Indonesia jangan gamang menghadapi globalisasi, tetapi **harus cerdas, bijak, dan tampil memanfaatkan peluang** untuk meraih kemajuan dan kesejahteraan rakyat (Kompas, 23/3/2006).

Globalisasi adalah istilah untuk menggambarkan **aneka fenomena positif dan negatif**. Revolusi di bidang komunikasi, misalnya dengan cepat mengatasi soal jarak. Hal itu juga ikut memunculkan sistem ekonomi yang didominasi *finance capital*, yang sebelumnya dipegang *industry capital*. Perkembangan ini dimungkinkan instabilisasi finansial bersamaan regulasi ekonomi moneter, liberalisasi pasar uang dalam negeri, dan dibukakannya pasar uang bagi transaksi internasional yang memudahkan spekulasi.

Pro Kontra

Bagi **para pendukungnya**, globalisasi yang didominasi paradigma (ekonomi) *neo-liberal* diyakini sebagai “*mesin kemakmuran*”. Sementara bagi **kelompok penentang**, globalisasi identik dengan “*ledakan profit yang menyengsarakan orang miskin*”. Paling tidak sejak demi anti-WTO di **Seattle**, akhir 1999, menjadi jelas bahwa oposisi terhadap globalisasi telah mengglobal dan diakui pemimpin dunia. **Bill Clinton**, misalnya saat di Seattle, mengatakan, “Bila ingin tidak terjadi protes dalam setiap konferensi perdagangan, WTO harus memberi kesempatan agar suara buruh, aktivis lingkungan dan negara berkembang bisa di dengar. Setiap keputusan harus transparan, akses ke dokumen harus dibuka, juga kejelasan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil.” (*Seattle Post Intelligencer*, 1/12/99).

Berbagai protes terhadap globalisasi yang kian gencar memicu diskusi tentang keterbatasan pasar dan seberapa perlu negara harus *mengintervensi* (baca : berpihak) dalam mengupayakan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan klaim pendukung *neo-liberal*, semarak perekonomian sesuai Perang Dunia II, tidak hanya disebabkan liberalisme perdagangan, tetapi juga berkat kebijakan kesejahteraan negara. Saat itu sebuah konsep ekonomi (*new deal*) berlandaskan teori **Keynes** diluncurkan Pemerintah Negara Amerika Serikat. Sasaran, peningkatan daya beli masyarakat. Lewat “bantuan pembangunan” (baca : utang), negara-negara berkembang diasumsikan mampu mengejar ketertinggalannya dari negara kaya.

Konsep *neo-liberal* diakui bisa bermanfaat dalam usaha mengurangi mentalitas *rent reeking* para birokrat. Namun, pada sisi lain ekonomi pasar murni yang meminggirkan peran negara sebagai penyeimbang, gagal memenuhi janjinya. Kesenjangan antar negara kaya-miskin. Tiga contoh berikut, memperjelas hal itu. *Pertama*, asumsi *neo-liberal* pasar modal tidak hanya membantu penggunaan kapital secara optimal, tetapi juga menjamin pertumbuhan dan pengadaan lapangan kerja, tidak terbukti. Penyebabnya, pasar modal menjadi pasar spekulatif yang digelembungkan (*Spekulativer Marktaufbläehung*). Fluktuasi kurs di buras efek tidak menggambarkan kekuatan ekonomi yang sebenarnya dari

aneka perusahaan anggotanya. Tanpa regulasi, pasar modal global bisa mempengaruhi kuat-rapuhnya stabilitas ekonomi sebuah negara, kawasan, bahkan dunia, seperti diperlihatkan “Krisis Asia” yang dampaknya masih terasa di Indonesia hingga sekarang.

Kedua, penelitian **Pritchett** (1996) membuktikan bahwa dalam globalisasi terjadi kesenjangan meluas. Pemenang proses globalisasi adalah negara-negara kaya anggota OECD, sementara negara berkembang kian terpinggirkan. Dan *ketiga*, kekuatan pasar tidak mampu mencegah krisis lingkungan global. Meski harus diakui, kegagalan yang sama dialami negara, terutama terkait monopoli dan oligopoli.

Negara Yang Efisien

Untuk membendung dampak negatif globalisasi neo-liberal diperlukan negara yang efisien. Akan tetapi, pada saat yang sama akibat keterpenggalan antara ekonomi global dan politik nasional, kebijakan proteksionistis oleh negara akan mengalami kegagalan. Bagaimana mengatasinya ?

Solusinya adalah kian menyatunya masyarakat global, yang memunculkan berbagai lembaga ekonomi dan politik serta terbentuknya *global civil society*. Sebagai instansi politik terpenting, negara dapat berfungsi sebagai mediator kepentingan nasional dalam membendung dampak destruktif globalisasi. Pada saat yang sama negara diharapkan menjadi moderator berbagai proses di masyarakat sebagai instansi integrasi dan penengah yang mencegah fragmentasi di masyarakat.

Kegiatan politik lokal yang memberdayakan potensi lokal menjadi penting terkait eratnya jaringan internasional. Kelompok kepentingan lokal dapat memperkuat berbagai faktor dalam memperkuat berbagai faktor seperti pendidikan, budaya, infrastruktur, dan mengorganisasi jaringan lokal seperti perluasan partisipasi politik, seleksi jenis investasi, dan penguatan potensi ekonomi lokal.

Tak kalah penting fungsinya *global governance*. Untuk itu dibutuhkan kerja sama antara negara dan masyarakat sipil di tataran lokal, nasional dan internasional. Sasarannya, reorganisasi politik dalam semua tataran aksi melawan logika pasar murni. Secara normatif, *global governance* berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dunia. Untuk itu, dibutuhkan tatanan perdagangan dunia yang menyudahi marjinalisasi, termasuk aturan persaingan yang melarang praktik monopoli dan dominasi perusahaan raksasa transnasional. Berbagai prakondisi yang perlu disiapkan agar kita tidak gamang menghadapi globalisasi.

Sumber : IVAN A HADAR, Direktur Eksekutif Indonesian Institut For Democracy Education (Ide), Kompas, 5/4/2006.

E. PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP BANGSA DAN NEGARA INDONESIA

Bangsa Indonesia, seperti halnya bangsa-bangsa lain dalam era globalisasi ini tidak dapat menghindar dari arus derasnya kompleksitas perubahan (inovasi) sebagai akibat canggihnya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, tatanan ekonomi dunia yang mengarah pada pasar bebas, serta tingkat efisiensi dan kompetisi yang tinggi di berbagai bidang kehidupan.

Beberapa indikator pengaruh negatif maupun positif globalisasi yang melanda bangsa dan negara Indonesia antara lain dapat dilihat berikut ini.

No	Bidang	Indikator Perubahan / Dampak Globalisasi
1.	Politik	<ul style="list-style-type: none"> – Penyebaran nilai-nilai politik Barat baik secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi yang semakin berani dan terkadang “mengabaikan kepentingan umum” dengan cara membuat kerusuhan dan anarkhis. – Semakin lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat dan gotong royong. – Semakin menguatnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat individual, kelompok, oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. – Transparansi, akuntabilitas, dan profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan negara (jabatan-jabatan publik) semakin mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. – Semakin banyak lahirnya partai politik, organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjadi “sponsor” kepentingan tertentu dengan menyuarakan Hak Asasi Manusia, Supremasi Hukum, demokratisasi, Lingkungan, dan sebagainya.
2.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> – Berlakunya “<i>The survival of the fittest</i>” sehingga siapa yang memiliki modal yang besar akan semakin kuat dan yang lemah tersingkir. Untuk negara berkembang seperti Indonesia masih sangat merasakan akibatnya. – Pemerintah hanya sebagai regulasi dalam pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. – Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya sudah semakin ditinggalkan. – Kompetisi produk dan harga semakin tinggi sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin selektif.
3.	Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> – Mudahnya nilai-nilai Barat yang masuk baik melalui internet, antena parabola, media televisi, maupun media cetak yang kadang-kadang ditiru habis-habisan. – Semakin mudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup <i>individualistis</i> (kepentingan diri sendiri), <i>pragmatisme</i> (yang menguntungkan), <i>hedonisme</i> (kenikmatan sesaat), <i>permisif</i> (membiarkan yang dianggap tabu) dan <i>konsumerisme</i> (lebih senang memakai dari pada membuat). – Semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial sehingga dalam keadaan tertentu (musibah,

		<p>kecelakaan, sakit, dll.) hanya ditangani segelintir orang (kurang adanya kebersamaan).</p> <ul style="list-style-type: none"> – Semakin mudarnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena dianggap tidak ada hubungannya (<i>sekulerisme</i>).
4.	Hukum, Pertahan dan Kemanan	<ul style="list-style-type: none"> – Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. – Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat. – Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. – Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan dan ketertiban negara yang profesional. – Peran masyarakat dalam menjaga kemanan, kedaulatan dan ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab pihak tentara dan polisi.

DENGAN EKONOMI PANCASILA MENYIASATI GLOBALISASI

Oleh : Mubyarto

The success of Indonesia's economic policies confirmed the idea that, as much as possible, economic policies should be insulated from undue political influence. Moreover, experience has demonstrated that alternative schools of economic policy making, including communism, socialism, and even "supply side economics", in the long run have all failed. In the meantime the field of neo-classical economics is progressing steadily. It is here that policy making should seek guidance in creating economic policies (Radius Prawiro, 1998:335)

In this precarious state, the government took the bold move of removing all restrictions on the flow of capital into and out of the country. Indonesia's laws governing the flow of capital thus became some of the most liberal in the world, more so even than those of many of the most developed countries (Radius Prawiro, 1998:290).

Neo-Liberalism, in its extreme or revised form, presents us with a view of the world in which there are only two choices, an economy organized by markets or an economy organized by a dictatorial –or at best inept and inefficient- statist bureaucracy (Mac Ewan 1999:11)

Pendahuluan

Globalisasi mempunyai 2 pengertian *pertama*, sebagai deskripsi/definisi yaitu proses menyatunya pasar dunia menjadi satu pasar tunggal (*borderless market*), dan *kedua*, sebagai "obat kuat" (*prescription*) menjadikan ekonomi lebih efisien dan lebih sehat menuju kemajuan masyarakat dunia. Dengan dua pengertian ini jelas bahwa menurut para pendukung globalisasi "tidak ada pilihan" bagi setiap negara untuk mengikutinya jika tidak mau ditinggalkan atau terisolasi dari perekonomian dunia yang mengalami kemajuan sangat pesat.

Benarkah pilihannya hanya dua sebagaimana dikemukakan paham Neo-liberalisme? Benarkah tak ada hak sama sekali bagi setiap negara untuk "berbeda" dengan menerapkan sistem ekonomi yang sesuai sistem nilai dan budaya negara-negara bersangkutan? **Arthur Mac Ewan** membantah keras pandangan "tidak ada pilihan" ini dengan secara tegas menyatakan: *Contrary to the claims of its proponents, there are alternatives to the neo-liberalism course, and these alternatives are far preferable in term of immediate and long term consequences* (Mac Ewan 1999:8). Lebih tegas lagi pernyataan **James Petra** dan **Henry Veltmeyer** dalam *Globalization Unmasked* bahwa "*globalization is neither inevitable nor necessary*" (Petras & Veltmeyer 2001:12)

Hikmah Krisis Moneter

Orang Indonesia selalu berhasil menyatakan "untung" atas berbagai musibah. Maka, adakah alasan orang menyatakan "untung ada krismon"? Ternyata dalam segala kesusahan menghadapi globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan

investasi, bahkan termasuk meledaknya “bom Bali”, orang Indonesia masih mampu menyebutkan aspek keuntungannya. Seorang rekan ekonom dari AS menulis “*A less globalized world might be better for Indonesia*”! Jadi tanpa Indonesia susah-susah melawan serangan dahsyat globalisasi, krismon dan Bom Bali telah membantu Indonesia “mengusir atau mengurangi tekanan globalisasi” yang memang lebih merugikan ketimbang menguntungkan ekonomi Indonesia. Terhadap kekuatan-kekuatan “anti globalisasi” ini para pendukung globalisasi berusaha dan berhasil mengundang IMF untuk memperkuat barisan. Kini yang terjadi adalah pergulatan (ilmiah dan ideologis) antara dua kekuatan yaitu mereka yang mendukung dan yang menentang globalisasi.

Kesimpulan kita di Indonesia tidak bisa lain, “jangan-jangan” krismon dan Bom Bali merupakan “Petunjuk Tuhan” bahwa globalisasi dan liberalisasi yang jelas-jelas merugikan sebagian besar rakyat Indonesia kenyataannya memang telah berjalan terlalu cepat sehingga “atas kehendak Tuhan”, krismon dan bom Bali “diturunkan” untuk memperingatkannya dan mengeremnya. *The region and the entire world need to carefully think through whether globalization has proceeded at too fast a pace for national societies, particularly developing ones, to make needed adjustments without undue dislocation and economic pain.* (Morrison & Hadi Soesastro. 1998:23)

Liberalisasi Perbankan 1983 - 1988

Jika kita baca dan renungkan kembali kekagetan **Radius Prawiro** tentang telah menjadi terlalu liberalnya peraturan masuk dan keluar modal ke dan dari Indonesia sejak pertengahan delapan puluhan, ketika yang bersangkutan menjabat Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Menko Ekuin, maka jelas telah terjadi gerakan tak terkendali dari liberalisasi dan globalisasi di negara kita. Jika diingat bahwa jumlah bank di Indonesia sebelum Pakto 88 hanya sekitar 100 buah, yang meningkat lebih 2 kali menjadi 240 bank pada tahun 1995, maka pengurangan jumlah Bank menjadi kurang dari 100 bank dewasa ini hanya mengkonfirmasi pertumbuhan jumlah bank yang kebablasan tersebut. Memang tepat yang pernah dikatakan **David Cole** dan **Betty Slater** (*Building a Modern Financial System*, 1996) bahwa sebenarnya di Indonesia bukannya terlalu banyak Bank, tetapi “terlalu banyak Bank yang tidak diawasi perkembangannya”. Ini berarti bahwa ketika banyak bank mengalami kesulitan likuiditas pada saat-saat awal krismon, kesalahan tidak sepenuhnya dapat ditimpakan kepada bank-bank itu tetapi juga pada Bank Indonesia (dan Departemen Keuangan) yang telah membiarkan perbankan berkembang “liar” tanpa pengawasan. Itulah sebabnya mengapa pemerintah dan Bank Indonesia memutuskan pemberian BLBI yang “royal” itu untuk “menebus dosa”, meskipun tanpa disadari justru kebijakan ini telah menjadi perangkat baru yang akhirnya “menyandera” kebijakan ekonomi pemerintah secara berkelanjutan.

Menyasati Globalisasi

Krismon 1997 dan sampai tingkat tertentu ledakan “bom Bali” adalah “bom waktu” buatan Indonesia sendiri, karena proses liberalisasi dan globalisasi telah dibiarkan berlangsung “kebablasan”, karena kita mengira sistem ekonomi kapitalis liberal (sistem pasar bebas ala Neoklasik ortodok) adalah satu-satunya sistem ekonomi yang cocok untuk dipakai dan diterapkan di Indonesia. Jika kita sadari dan percaya

bahwa Pancasila adalah ideologi yang telah menyatukan bangsa hingga mampu membebaskan Indonesia dari 350 tahun penjajahan, maka **Pancasila pastilah dapat diandalkan** sebagai sumber ideologi untuk menyusun sistem ekonomi nasional. Jika perasan Pancasila adalah asas gotong-royong atau asas kekeluargaan, maka tepat sekali bunyi ayat 1 pasal 33 UUD 45 bahwa: *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.* Dalam asas kekeluargaan terkandung pengertian demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang.

Demikian “serangan” globalisasi tidak perlu kita takuti selama kita setia menggunakan Pancasila sebagai ideologi pegangan kehidupan bangsa. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi moralistik, manusiawi, nasionalistik, dan kerakyatan, yang akan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penutup

Jika orang menyatakan globalisasi tak terelakkan, hendaknya kita tidak bersikap pasrah dan menerima begitu saja “aturan main” yang dibuat “mereka”. Jika aturan main yang dipakai adalah “sistem Ekonomi Pancasila”, maka aturan main “kita” inilah yang harus kita pakai sebagai pegangan hubungan-hubungan ekonomi dengan kepentingan-kepentingan ekonomi luar negeri dan bukan aturan main “mereka”.

Globalisasi bukan hal baru bagi Indonesia karena sejak abad-abad awal penjajahan (17-18) rempah-rempah dan komoditi-komoditi pertanian Indonesia sudah “diglobalisasikan” (globalisasi tahap I). Selanjutnya globalisasi tahap II (sistem taman paksa 1830-1870) dan sistem kapitalis liberal (pasca 1870) lebih jauh lagi “mengglobalkan” komoditi-komoditi pertanian Indonesia (terutama gula dan tembakau) sehingga “Hindia Belanda” menjadi terkenal sebagai sumber komoditi-komoditi tropik ini. Kini pada globalisasi tahap III (sejak medio delapan puluhan) Indonesia yang sudah menjadi negara merdeka tentulah tidak perlu was-was asal berani dan percaya diri dengan kepala tegak menetapkan aturan main “kita” untuk dipakai sebagai pegangan hubungan-hubungan ekonomi “kita” dengan “mereka”.

Sumber : http://www.ekonomirakyat.org/edisi_21/artikel_1

KESIMPULAN

1. Globalisasi berarti suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak nampak lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata. Dalam keadaan global, tentu apa saja dapat masuk sehingga sulit untuk disaring atau dikontrol. Tentang globalisasi banyak pakar yang telah memberikan definisi, seperti : Malcolm Waters, Emmanuel Ritscher, Thomas L.Friedman, dan sebagainya.
2. Era globalisasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk lebih berperan lebih besar pada prakarsa dan kreativitas melalui berbagai infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi, sosial-budaya dan politik. Dengan globalisasi, seakan membuat batas-batas antar negara semakin kabur sehingga meningkatkan mobilitas dan dinamika masyarakat termasuk timbulnya gagasan-gagasan baru di berbagai bidang dan aspek kehidupan menuju satu kepentingan global yang melebihi kepentingan masing-masing negara.
3. Dalam proses globalisasi, perkembangan yang paling menonjol antara lain bidang informasi seperti berita, televisi dan bahan siaran. Demikian juga di bidang ekonomi (perdagangan), teknologi, wawasan, perilaku dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Sedangkan pada aspek-aspek globalisasi, akan nampak adanya arus etnis, arus teknologi, arus keuangan, arus media dan arus ide.
4. Tren globalisasi pada abad 21 mempunyai karakteristik antara lain : perubahan yang akseleratif, aliran modal tanpa batas, hiper kompetisi, ekonomi pengetahuan, bersifat global dan kompleks.
5. Dampak globalisasi yang dirasakan oleh masyarakat internasional dapat diidentifikasi antara lain mencakup bidang ekonomi, ideologi, politik, hukum, dan sosial. Dari semua bidang kehidupan tersebut globalisasi juga memiliki baik dampak yang bersifat positif maupun negatif.
6. Berbagai tantangan mendasar yang dihadapi dalam era globalisasi antara lain : sikap individualisme, apresiasi generasi muda, pandangan kritis terhadap ideologi negaranya, diversifikasi masyarakat dan keterbukaan yang lebih tinggi.
7. Isu-isu internasional yang terkait dengan dampak globalisasi yang paling sering muncul di permukaan antara lain : isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi, hak asasi manusia, transparansi, pelestarian lingkungan hidup, pluralisme dan pasar global serta pesaing global.
8. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara mencakup bidang ekonomi, teknologi, politik, sosial dan lingkungan hidup. Pengaruh lain juga adanya wawasan global yang antara lain terdiri dari budaya global, konsep global, pendangkalan wawasan dan kehidupan demokrasi, isu global dan politik global.
9. Pengaruh globalisasi, dapat menimbulkan aspek positif dan aspek negatif. Pada aspek positif antara lain mencakup globalisasi teknologi, perdagangan, industri dan jasa, sosial dan budaya, lingkungan dan politik. Sedangkan pada aspek negatif antara lain :
10. Dampak globalisasi yang dirasakan oleh bangsa Indonesia telah menyentuh dalam berbagai bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan serta keamanan.

GLOBALISASI DAN KRISIS PEMBANGUNAN: BAGAIMANA DENGAN INDONESIA

Pendahuluan

Pada tanggal 29 Mei 2005 yang lalu, rakyat Perancis melaksanakan referendum untuk meratifikasi konstitusi Uni Eropa. Hasilnya, sekitar 54,87% rakyat Perancis memilih “*naif*”, sementara hanya 45,13% suara memilih “*auf*” (Teiipo, 12 Juni 2005). Diikuti oleh penolakan rakyat Belanda dan desakan yang semakin kuat di dua negara lainnya di kawasan Uni Eropa, Inggris dan Luxemburg, banyak kalangan mulai mempertanyakan masa depan organisasi supranasional (Uni Eropa) yang paling ambisius ini.

Bagi sebagian rakyat Perancis, penolakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kegagalan pemerintah dalam menjaga dan mening- katkan kesejahteraan warga negara. Kebijakan Perdana Menteri Perancis, Jean-Pierre Raffarin, yang kelewat liberal dianggap menjadi biang kemunduran ekonomi Perancis. Pertumbuhan ekonomi Perancis hanya 2% dengan tingkat pengangguran mencapai angka dua digit, sebesar 10, 2% pada tahun 2004 (Tempo, 12 Juni 2005).

Perasaan serupa juga mengharu biru rakyat Belanda yang mengadakan referendum pada tanggal 1 Juni 2005. Di negara ini, para penentang konstitusi Eropa merayakan kemenangan mereka dengan menyanyikan gubahan syair di jalan-jalan dan kafe-kafe, yang kira- kira berbunyi: “*Jika kau ingin Eropa yang sosial dan Eropa untuk rakyat, bukan untuk bisnis dan uang, maka katakan tidak kepada konstitusi*” (Gatra, 11 Juni 2005).

LALU apa relevansi paparan tersebut disampaikan di mimbar yang terhormat ini? Khususnya, hubungan narasi ini dengan penolakan rakyat di kedua negara tersebut terhadap Konstitusi Eropa?

Indonesia memang bukan menjadi bagian Uni Eropa, dan juga tidak sedang menuju ke sana, tetapi ancaman yang dirasakan oleh rakyat Perancis dan rakyat Belanda sebenarnya juga menjadi ancaman terhadap keseluruhan warga negara di dunia, termasuk rakyat Indonesia. Dalam pengertian. proyek liberalisasi neoliberal telah mengancam keamanan manusia (*human security*) dalam pengertian yang luas. Bukti mengenai hal ini dapat dilihat dari rendahnya pertumbuhan ekonomi, globalisasi kemiskinan, dan semakin mening- katnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin pasca-diterapkannya kebijakan ekonomi neoliberal.

Sebuah penelitian yang membandingkan pertumbuhan GDP antara dua periode, yakni periode antara tahun 1980-2000 yang dianggap sebagai masa keemasan ekonomi global dengan periode 1960-1980 yang dianggap sebagai era keemasan ekonomi- regulasi menemukan data sebagai berikut (Priyono, 2004) ` Negara-negara termiskin di dunia mengalami penurunan pertumbuhan dari 1,9% selama 1960-1980 menjadi - 0,5% selama 1980-2000, sedangkan negara-negara seperti Indonesia, Panama, dan Pantai Gading mengalami penurunan pertumbuhan GDP dari 3,6% (1960-1980) menjadi hanya 1% (1980-2000). Sementara itu, laporan UNDP tahun 1999

menyebutkan bahwa karena peluang-peluang dalam globalisasi tidak terbagi secara merata ke seluruh dunia, dan kegagalan pertumbuhan pada dekade lalu yang terus berlanjut, telah membuat kondisi kemiskinan dan ketimpangan semakin buruk. Laporan itu menyebutkan lebih dari 80 negara menunjukkan mayoritas penduduk mereka masih berada pada tingkat pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan satu dekade yang lalu. Pada waktu yang sama, 40 negara terus mengalami pertumbuhan dengan' rata-rata pertumbuhan hanya mencapai 3% per tahun sejak tahun 1990-an, sedangkan 55 negara yang hampir semuanya berada di kawasan Sub- Sahara Afrika dan Eropa Timur dan CIS (Commonwealth of Independent States) tengah mengalami penurunan dalam pendapatan mereka.

Di kawasan-kawasan tertentu, kondisi kemiskinan ini menjadi semakin bertambah buruk. Dengan mengambil garis kemiskinan yang ekstrim dengan menyejajarkan konsumsi per hari dengan satu dollar Amerika Serikat, pada pertengahan tahun 1990-an, kurang lebih sekitar 33 % penduduk dunia yang berada di negara-negara sedang berkembang berada dalam kesengsaraan. Mereka tersebar di tiga wilayah, yakni di Asia Selatan sebesar 550 juta jiwa, Sub-Sahara Afrika sebesar 215 juta, dan di Amerika Latin sebesar 150 juta (Castel, 2000).

Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Pada tahun 1998, jumlah orang miskin di Indonesia sebesar 49,5 juta jiwa atau sebesar 24,23% dari keseluruhan jumlah penduduk dibandingkan pada tahun 1996 yang mencapai 22,5 juta jiwa atau sekitar 112%. Persentase penduduk miskin ini mendekati kemiskinan yang terjadi pada tahun 1981 dan 1984. Pada tahun 1981, jumlah orang miskin di Indonesia sebesar 40,6 juta jiwa atau 26,59%, dan pada tahun 1984 sebesar 35 juta atau 21,64% (Billah. 2002).

Krisis moneter mengakibatkan pilar-pilar ekonomi Indonesia mengalami keguncangan, dan kemudian runtuh. Sektor ekonomi modem, seperti industri, konstruksi dan keuangan telah hancur. Dampaknya jutaan kaum pekerja kehilangan lahan kehidupan mereka sehingga menambah jumlah orang yang masuk ke dalam barisan pengangguran. Diperkirakan bahwa angka pengangguran telah mencapai 40 juta orang (dikutip dari Effendi dalam Winarno, 2003).

Tidak dapat disangkal lagi, krisis moneter yang berujung pada krisis multidimensi telah membuat kondisi kemiskinan menjadi semakin buruk. "Penyakit" pembangunan yang muncul sebagai akibat pembangunan berorientasi pertumbuhan yang dilaksanakan sejak tahun 1960-an dan 1970-an ini, telah menjadi semakin merajalela dan bertambah parah seiring ketersediaan lapangan kerja, pendidikan untuk kaum miskin, akses layanan kesehatan, gizi balita, dan jaminan lingkungan yang semakin buruk, ataupun korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bertambah luas, serta amburadulnya penegakan hukum. Dengan berpijak pada kondisi demikian, tidaklah terlampau berlebihan jika dikatakan bahwa pembangunan yang telah dilakukan selama lebih dari tiga dasawarsa telah gagal meraih tujuan yang diharapkan, yakni perbaikan taraf hidup masyarakat dalam segala dimensi kehidupannya.

Pertanyaannya kini adalah mengapa pembangunan yang telah dilakukan selama hampir tiga dasawarsa tersebut gagal meraih tujuan yang diharapkan? Apakah kegagalan pembangunan semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor intenal (seperti

ketiadaan good governance) atau karena terjadi kesalahan paradigmatis yang lebih luas, yakni menyangkut paradigma pembangunan yang dipakai?

Seperti diketahui, sejak tahun 1980-an, seiring kemenangan kelompok Kanan Baru atau the New Right di Inggris dan Amerika Serikat, paradigma pembangunan telah berubah dari *state-led development* ke arah *market-driver development*, dan tidak ketinggalan pula,

Indonesia merespon perubahan ini dengan meluncurkan kebijakan liberalisasi ekonomi dan perdagangan melalui paket-paket deregulasi tahun 1980-an. Jika demikian halnya, maka apakah krisis pembangunan semacam ini mempunyai kaitan erat dengan globalisasi tatanan neoliberal yang mulai berpengaruh sejak era tahun 1980-an tersebut?

Pembahasan ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi meskipun mungkin tidak cukup komprehensif. Namun setidaknya, akan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi alternatif pemecahan persoalan pembangunan yang kini tengah dihadapi oleh Bangsa Indonesia, terutama kaitannya dengan globalisasi ekonomi yang telah menjadi trend sejak tahun 1980-an dan 1990-an. Namun, sebelum dieksplorasi lebih jauh topik yang dibicarakan ini` perlu kiranya diperjelas terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan krisis pembangunan dalam pidato ini, dan bagaimana globalisasi menyumbangkan krisis semacam itu?

Akhirnya, adakah pilihan alternatif pemecahan persoalan pembangunan yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia agar bisa keluar dari kemelut ini?

I. Makna dan Tujuan Pembangunan

Para ahli cenderung berbeda dalam memberi makna dan mendefinisikan pembangunan. Ini akan sangat tergantung pada dimensi mana yang ingin ditekankan. Jika dirunut berbagai pemikiran yang berkembang dalam mendefinisikan pembangunan, maka nampak bahwa pembangunan bukanlah konsep yang statis, tetapi ia senantiasa berkembang sesuai dengan konteks waktu yang melingkupinya.

Dalam hal ini, Adrian Leftwich (2000) mengemukakan bahwa pemahaman pembangunan yang paling umum dapat dikategorikan ke dalam sembilan pendekatan pokok, yakni pembangunan dilihat sebagai kemajuan historis (*development as historical progress*), pembangunan sebagai eksploitasi sumber daya alam (*development as the exploitation of natural resources*), pembangunan sebagai promosi kemajuan ekonomi, dan (kadang kala) sosial, dan politik yang direncanakan (*development as the promotion of planned of economic, and (sometimes) social and political advancement*); pembangunan sebagai suatu kondisi (*development as a condition*), pembangunan sebagai suatu proses (*development as a process*); pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi (*development as economic growth*); pembangunan sebagai perubahan struktural (*development as structural change*); pembangunan sebagai modernisasi (*development as modernization*); dan pembangunan sebagai suatu peningkatan kekuatan produksi (*development as an increase in the forces of production*). Diantara pendekatan tersebut, pertumbuhan, modernisasi, dan perubahan struktur telah menjadi Ortodoksi dominan menyangkut makna dan tujuan pembangunan pada tahun-tahun segera setelah Perang Dunia II. Ortodoksi semacam ini muncul bersamaan dengan peristiwa rekonstruksi dan

pembangunan ekonomi di negara-negara Barat sebagai benteng terhadap komunisme (Packenham, 1973 seperti dikutip Leftwich 2000).

Pada perkembangan selanjutnya, konsep pembangunan ini mengalami pergeseran seiring dengan perubahan yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga, dunia internasional, dan negara-negara maju pada era tahun 1960-an (Leftwich, 2000). Pertama, setelah mengalami masa kolonialisme yang panjang, negara-negara baru ' merdeka bergabung ke dalam PBB sehingga mendorong terjadinya perubahan keseimbangan politik dalam organisasi tersebut atau .- setidaknya dalam General Assembly dan birokrasi PBB (Dadzie, 1993 seperti dikutip Leftwich, 2000). Kedua, adanya gerakan yang lebih radikal menyangkut bagaimana pembangunan seharusnya dipahami yang muncul di kalangan elit~elit politik di negara-negara Dunia Ketiga.

Pergeseran ini terus berlanjut. Pada era tahun 1970-an, pembangunan lebih dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia (*development as basic human needs*). Perubahan ini terjadi karena pembangunan yang berorientasi pertumbuhan telah gagal memenuhi harapan karena pertumbuhan ekonomi tidak menetes ke bawah (*'trickle down effect*) sebagaimana dirumuskan dalam teori.

Menurut studi yang dipublikasikan pada tahun 1974, pertumbuhan cepat dalam satu dekade di negara-negara kurang berkembang (*underdeveloped*) ternyata tidak banyak membeli keuntungan bagi sebagian besar masyarakat di negara tersebut karena meskipun pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5% sejak tahun 1960-an, tetapi pertumbuhan itu tidak didistribusikan secara merata baik dalam, antarkawasan, dan kelompok-kelompok sosial ekonomi (Chenery, erat., 1974 seperti dikutip Leftwich, 2000). Akibatnya, pembangunan telah mendorong terjadinya kesenjangan (*inequality*), dan bahkan membuat kesenjangan tersebut menjadi semakin melebar.

Bank Dunia dan Pembangunan

Nampaknya, tidaklah cukup lengkap membahas pembangunan tanpa menyinggung Bank Dunia mengingat kedudukannya sebagai promotor paling wahid dalam mempromosikan pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga. Bermula sebagai sebuah badan sederhana penyedia dana untuk rekonstruksi pasca-Perang Dunia

Kedua. Kini, Bank Dunia telah mentransformasi diri secara bertahap menjadi sebuah bank pembangunan, badan pemberi bantuan, pelopor gerakan anti kemiskinan, dan pendukung state retrenchment (penyederhanaan struktur dan institusi negara) dalam rangka penyesuaian struktural (Pincus and Winters, 2004). Keterlibatan Bank Dunia dalam pembangunan telah membentang ke seluruh benua dari Afrika, Amerika Latin, Asia, dan Eropa. Beberapa proyek pembangunan yang disponsori Bank Dunia ada yang berhasil, tetapi tidak sedikit yang menuai kegagalan. Bahkan, proyek-proyek pembangunan yang mensyaratkan adanya Structural Adjustment Programs (SAPs) di Afrika, misalnya, di negara-negara yang dibantunya telah menyisakan kegagalan yang meresahkan dan menuai banyak kritik (Dibua, 1998; Kim, 2003).

Pada awalnya, pembangunan yang diprakarsai Bank Dunia lebih menitikberatkan pada pertumbuhan, perubahan struktural, dan modernisasi yang didominasi oleh pemikiran pasca-Perang Dunia Kedua. Pada masa ini, berkembang suatu konsensus bahwa keterlibatan negara diperlukan dalam rangka mempromosikan pembangunan, yang pada akhirnya lebih dikenal sebagai "an activist role for government". Meskipun

demikian, peran aktif negara tersebut diorientasikan dalam rangka modernisasi, dalam arti mendorong dan memperluas prinsip-prinsip pasar dan perluasan ekonomi kapitalis (Leftwich, 2000).

Selanjutnya, meskipun Bank Dunia tetap menekankan pada pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai core pembangunan, tetapi pada era tahun 1970-an telah mulai menekankan pentingnya pembangunan sosial. Pergeseran titik tekan ini berlangsung di bawah kepemimpinan McNamara yang merasa kurang puas terhadap pembangunan berorientasi pertumbuhan. McNamara menekankan bahwa ketika Bank Dunia masih mempunyai komitmen untuk mendorong mobilisasi kapital dan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator untuk mengukur produktivitas negara-negara Dunia Ketiga maka pada waktu bersamaan seyogianya diperkenalkan suatu pemahaman bahwa pembangunan seharusnya memiliki tujuan-tujuan sosial, seperti pengurangan kemiskinan ataupun mempromosikan keadilan sosial. Oleh karenanya, Bank Dunia harus memberi perhatian kepada isu-isu, seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, reformasi agraria, kesehatan, dan perlindungan lingkungan (Leftwich, 2000).

Penggunaan indikator sosial ini merupakan perkembangan yang cukup berarti. Meskipun demikian, pada waktu bersamaan, telah berkembang suatu pemikiran yang pada akhirnya turut mendorong kemunduran program-program promosi pembangunan dan keadilan sosial. Pada era tahun 1980-an, arus pemikiran utama di bidang ekonomi politik didominasi oleh pemikiran neoliberal yang diprakarsai oleh Milton Friedmann dan Friedrich Hayek sebagai respon terhadap kegagalan negara kesejahteraan Keynesian. *'The lost decade for development'* merupakan ungkapan untuk menyebut era tersebut karena pikiran-pikiran neoliberal tidak saja berpengaruh terhadap konsepsi pembangunan, tetapi juga menyangkut kebijakan dan strategi yang dilaksanakan (Toye, 1981 seperti dikutip Leftwich, 2000). Di bawah pemikiran dan kebijakan neoliberal, pemerintah di negara-negara Eropa dan Amerika Latin mulai menggeser perhatian mereka dari peran statis dan lisdistributif ke arah gagasan dan kebijakan neoliberal yang lebih menekankan pada peran pasar .bebas, mengurangi peran negara dalam pembangunan dan mempromosikan perdagangan bebas dan kebijakan investasi asing. Singkatnya, pendekatan neoliberal dapat dirangkum dalam sudut pandang, bahwa dari titik pembangunan: "pasar yang tidak sempurna jauh lebih baik dibandingkan dengan negara yang tidak sempurna" (Colslougli` 1993 dikutip dari Leftwich, 2000) atau dalam bahasa Hayek (1960, 1976 seperti dikutip Held, 1995) pasar bebas tidak selalu beroperasi sempurna, tetapi keuntungannya secara radikal lebih banyak daripada kerugiannya.

Sebagai sebuah gagasan yang dominan pada waktu itu, pandangan-pandangan neoliberal juga diserap oleh Bank Dunia melalui apa yang sering disebut sebagai *Structural Adjustment Programs* (SAPs). Program ini mendapatkan inspirasinya dari Konsensus Washington yang terdiri dari tiga pilar utama, yakni liberalisasi perdagangan dan keuangan; deregulasi; dan privatisasi.

Menurut pandangan ini, pemerintahan di negara-negara berkembang dan negara-negara maju dianggap terlalu banyak membuang energy guna melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan sehingga mengalihkan dari apa yang seharusnya dilakukan. Persoalannya bukan pada terlalu besarnya pemerintahan, tetapi lebih karena pemerintahan tidak mempunyai cukup kemampuan untuk melakukan sesuatu

dengan benar. Pemerintah tidak mempunyai cukup kemampuan untuk menjalankan bisnis dengan baik, dan kompetisi antarperusahaan swasta dianggap akan mempunyai kinerja yang lebih baik. Ini menjadi landasan bagi pentingnya privatisasi perusahaan-perusahaan negara baik di negara-negara maju maupun di negara-negara sedang dan kurang berkembang (Stiglitz, 2002). Selain privatisasi, yakni pengalihan perusahaan negara ke dalam pemilikan dan pengelolaan swasta, agenda penting program penyesuaian struktural adalah liberalisasi. Dalam kaitan ini, liberalisasi dilihat sebagai penghapusan campur tangan pemerintah di bidang pasar keuangan, pasar modal, dan hambatan-hambatan perdagangan (Stiglitz, 2002). Liberalisasi perdagangan diharapkan akan mendorong penggunaan sumber-sumber ekonomi yang lebih efisien berdasarkan prinsip teori keuntungan komparatif sehingga akan mendorong produktivitas ekonomi nasional suatu negara. Namun, baik privatisasi dan liberalisasi yang disponsori oleh Bank Dunia dan IMF dilakukan secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan prakondisi yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu. Akibatnya, privatisasi tidak memberikan keuntungan sebagaimana diharapkan, yakni memacu penumbuhan, melainkan mendorong munculnya masalah baru dalam bentuk menguatnya antipati terhadap gagasan tersebut. Termasuk di dalamnya, dilihat dengan curiga sebagai penjualan aset-aset negara secara murah kepada perusahaan-perusahaan asing. Privatisasi tidak lebih dari model penguasaan ekonomi nasional negara-negara Dunia Ketiga sebagai suatu bentuk kolonialisme baru di bidang ekonomi.

Sementara itu, dampak liberalisasi di negara-negara Dunia Ketiga yang diprakarsai Bank Dunia dan M juga dikritik karena dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Di mata pengkritiknya, bukan efisiensi ekonomi yang didapatkan sebagai hasil kompetisi di pasar internasional. tetapi matinya perusahaan-perusahaan lokal yang belum matang untuk berkompetisi (Stiglitz, 2002). Pengadopsian gagasan neoliberal di Bank Dunia dalam mendorong pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga melalui program penyesuaian structural telah menimbulkan kerugian-kerugian yang besar bagi masyarakat miskin dalam bentuk semakin mahalannya kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Barangkali, didasari oleh kegagalan-kegagalan ini, Bank Dunia mengembangkan suatu konsep pembangunan yang lebih komprehensif (Leftwich, 2000).

Pembangunan ekonomi seyogianya dilihat sebagai peningkatan standar hidup secara terus-menerus, yang meliputi konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan. Dalam lingkup yang lebih luas, pembangunan seharusnya mencakup atribut-atribut penting lainnya, seperti kesamaan kesempatan, kebebasan politik, dan sipil. Oleh karenanya, keseluruhan pembangunan seharusnya diarahkan guna meningkatkan hak-hak ekonomi, politik, dan hak sipil semua orang melintasi batas-batas etnis, gender, kelompok, agama, ras, wilayah, dan negara.

Definisi pembangunan Bank Dunia yang menyertakan perlunya kesamaan kesempatan dan kebebasan ini dipertajam oleh Amartya Sen (1999). Dalam sebuah buku yang banyak dibaca, *Development as Freedom*, Sen mengungkapkan dalam bab pendahuluan buku tersebut bahwa pembangunan dapat dilihat sebagai perluasan kemerdekaannya yang dinikmati masyarakat (*development can-be seen as a process of expanding the real freedoms that people enjoy*). Menurut Sen, dengan menekankan pada kemerdekaan manusia, membuat pandangan ini berbeda dengan pandangan-pandangan sempit pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan

ekonomi, peningkatan pendapatan, industrialisasi, kemajuan teknologi, dan modernisasi sosial. Pembangunan sebagai perluasan ruang kebebasan memerlukan penghilangan sumber-sumber ketidakbebasan tersebut, seperti kemiskinan sebagaimana halnya tirani; miskinnya kesempatan ekonomi sebagaimana halnya deprivasi sosial secara sistemik; dan pengabaian fasilitas publik sebagaimana halnya intoleransi atau tindakan berlebihan dari suatu negara yang menindas. Menurut Sen, kebebasan menjadi isu sentral dalam proses pembangunan karena dua alasan. Pertama, alasan evaluatif yang menegaskan bahwa penilaian kemajuan pembangunan seharusnya dipahami dalam pengertian apakah pembangunan telah mendorong kebebasan manusia?; Kedua, alasan efektivitas yang menegaskan bahwa hasil-hasil pembangunan sepenuhnya bergantung pada agen-agen manusia yang bebas. Sen melangkah lebih jauh dengan menegaskan bahwa pembangunan sebagai perluasan kebebasan (*expansion of freedom*) seyogianya dilihat dalam dua sudut pandang, yakni sebagai tujuan utama (*the primary end*) dan sarana pokok (*the principal means*).

Secara berturut-turut, keduanya disebut sebagai peran konstitutif (*constitutive role*) dan peran instrumental (*instrumental role*). Peran konstitutif kebebasan dalam pembangunan berhubungan erat dengan pentingnya kemerdekaan yang sesungguhnya (*substantive freedom*) dalam rangka memperbaiki kehidupan manusia. Termasuk kemerdekaan konstitutif diantaranya adalah kemampuan-kemampuan dasar untuk mencegah terjadinya pengurangan hak-hak dasar untuk memperoleh apa yang dibutuhkan, seperti kelaparan, kekurangan gizi, cacat, kematian pada usia dini, sama halnya kemerdekaan yang berkaitan dengan kesempatan untuk dapat membaca dan menulis, menikmati keterlibatan dalam aktivitas politik, kebebasan berbicara tanpa adanya sensor, dan lain sebagainya. Menurut cara pandang ini, pembangunan merupakan proses memperluas ruang kemerdekaan manusia, dan penilaian terhadap pembangunan haruslah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut.

Kebebasan instrumental berkenaan dengan kemerdekaan yang bersifat instrumental yang mendukung, baik langsung maupun tidak langsung, pencapaian kemerdekaan penuh (Sen, 1999). Kemerdekaan instrumental yang dimaksud Sen diantaranya adalah: (1) kebebasan politik, (2) kesempatan-kesempatan ekonomi, (3) peluang-peluang sosial, (4) jaminan keterbukaan, dan (5) perlindungan keamanan.

Demi memperjelas masing-masing kemerdekaan instrumental yang dimaksudkan Sen, pada kesempatan ini, akan diuraikan secara singkat seperti berikut ini. Pertama, adalah kebebasan politik. Dalam pengertian yang lebih luas, (termasuk di dalamnya hak-hak sipil) mengacu pada adanya peluang-peluang yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan siapa yang memerintah dan atas dasar apa pemerintahan tersebut, termasuk di dalamnya untuk melakukan pemeriksaan dan mengajukan kritik terhadap pemegang kekuasaan; memiliki kebebasan untuk mengungkapkan sikap politik dan adanya kebebasan pers tanpa sensor, kebebasan untuk memilih partai-partai politik yang tersedia, dan sebagainya. Singkatnya, kebebasan politik berkait erat dengan demokrasi politik dalam pengertian yang luas.

Kedua, kesempatan-kesempatan ekonomi. Kesempatan ekonomi merujuk pada ketersediaan peluang bagi setiap orang untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi untuk tujuan-tujuan konsumsi, produksi, atau pertukaran. Dalam kaitan ini, apa yang sering disebut sebagai pemenuhan hak-hak ekonomi tergantung pada sumber daya

yang tersedia untuk digunakan dan juga tersedianya syarat-syarat pertukaran seperti harga nisbi dan mekanisme bekerjanya pasar.

Dengan demikian, karena pembangunan ekonomi seharusnya meningkatkan pendapatan dan kekayaan suatu negara maka ia juga harus mencerminkan terjadinya penguatan hak-hak ekonomi penduduk sehingga jika ditarik hubungan antara kekayaan dan pendapatan nasional, pada satu sisi, dengan pemenuhan hak-hak ekonomi penduduk pada sisi yang lain, masalah pembagian dan pemerataan pendapatan menjadi hal yang penting. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan ketimpangan dalam distribusi pendapatan menyalahi kaidah ini. Ketiga, kesempatan-kesempatan sosial. Ini merujuk pada pengaturan-pengaturan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati pelayanan pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya yang mempengaruhi tercapainya kemerdekaan sesungguhnya bagi semua orang untuk hidup secara layak (Sen, 1999). Kesempatan atau peluang untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan ini adalah penting tidak hanya dalam rangka mencapai taraf hidup pribadi yang menyenangkan (seperti hidup sehat, tidak cacat dan bebas penyakit, terhindar dari kematian dini), tetapi juga penting dalam rangka partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan politik. Keempat, jaminan keterbukaan.

Kemerdekaan instrumental keempat ini berkaitan dengan kebutuhan akan adanya keterbukaan yang diharapkan semua orang, yakni kemerdekaan untuk saling berurusan satu dengan yang lain dengan jaminan adanya keterbukaan dan kejelasan. Jika hal ini dirusak, maka akan muncul akibat-akibat yang merusak bagi pihak ketiga. Jaminan keterbukaan ini juga menjadi alat yang efektif dalam rangka mencegah terjadinya tindak korupsi, penyelewengan keuangan, dan penyelesaian-penyelesaian tersembunyi yang mungkin merugikan kepentingan publik. Akhirnya` sampai pada kebebasan instrumental kelima, yakni perlindungan keamanan. Ini penting dan sangat dibutuhkan guna menyediakan jaring pengaman sosial sebagai usaha untuk mencegah penduduk yang menjadi korban menderita semakin parah. Ranah perlindungan keamanan ini mencakup pengaturan- pengaturan kelembagaan yang pasti seperti ketentuan hukum resmi bagi pemberian jaminan pengangguran dan bantuan-pendapatan tambahan bagi fakir miskin dan juga ketentuan-ketentuan mengenai keadaan darurat, seperti hibah untuk bencana kelaparan dan penyediaan bantuan lapangan kerja guna memperoleh pendapatan bagi kaum miskin.

Apa yang kemudian dapat disimpulkan dari paparan di atas adalah pembangunan meliputi dimensi yang kompleks, yang menyentuh dimensi fisik ataupun psikis. Ini berarti bahwa pembangunan tidak dapat direduksi hanya dengan menyandarkan padabesarnya investasi dan persentase pertumbuhan ekonomi, terlebih ketika pembangunan yang berorientasi pertumbuhan tersebut mensyaratkan stabilitas politik yang dicapai melalui represi, marginalisasi masyarakat miskin dengan menghalangi mereka mendapatkan kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, dan papan. Dengan kata lain, pembangunan tidak dapat semata-mata diserahkan kepada mekanisme pasar dengan menyubordinasi peran negara di bawah kedaulatan dan kekuatan pasar karena baik pasar maupun negara mempunyai tujuan yang secara substansi berbeda.

Pasar ada demi maksimasi keuntungan dan akan memberikan penghargaan bagi pembayar tertinggi, sedangkan negara didirikan untuk mengurus dan melindungi

kepentingan masyarakat secara keseluruhan tanpa dibedakan dari kelas sosial mana mereka berasal.

II. Globalisasi dan Kekuatan Penggerakannya

Di kalangan ilmuwan tidak ada kata sepakat dalam mendefinisikan globalisasi. Setidaknya, ada lima isu utama yang menjadi sumber perdebatan, yakni menyangkut konseptualisasi, factor penyebab, periodisasi, dampak, dan jalur perlintasan globalisasi (the trajectories of globalization) (Held, saat., 1999). Tentunya, setiap pendekatan yang digunakan akan mempunyai implikasi yang berbeda-beda dalam penjelasannya. Oleh karenanya, dalam pidato singkat ini, akan dipertajam salah satu pendekatan saja, yang dianggap dapat menjawab persoalan tentang bagaimana globalisasi berpengaruh pada terjadinya krisis pembangunan sejak era tahun 1980-an dan 1990-an?

Dalam kaitan ini, benar adanya ketika ada yang mengatakan bahwa globalisasi bukanlah merupakan fenomena yang sama sekali baru, tetapi sebagai hasil proses yang panjang yang berasal dari interaksi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, menyebar dan meluasnya kapitalisme, kemenangan politik Kelompok Kanan Baru atau neoliberal, dan hegemoni ilmu pengetahuan. Semua faktor ini tidak dapat begitu saja dilepaskan satu dengan yang lain karena masing-masing telah menyumbangkan bagi semakin intensifnya perkembangan globalisasi atau secara spesifik globalisasi ekonomi. Penting untuk menguji satu persatu bagaimana faktor-faktor yang telah disebutkan tadi memberi sumbangan bagi semakin mendalamnya globalisasi ekonomi dunia yang dikendalikan oleh ideologi neoliberal.

Pertama, Revolusi di Bidang Teknologi Komunikasi dan Semakin Rendahnya Biaya Transportasi

Perkembangan teknologi komunikasi dapat dianggap menjadi katalisator penting bagi semakin intensifnya globalisasi ekonomi. Selama tahun 1980-an, kemajuan dalam teknologi informasi telah mengalami suatu terobosan besar (breakthrough) dalam hal kekuatan, kemudahan penggunaan, dan ketersediaan teknologi. Kemajuan yang cepat dalam komputer dan peralatan lunak, dan konsolidasinya dalam telekomunikasi menimbulkan terbentuknya serangkaian teknologi pendukung dari mesin fax hingga siaran televisi melalui satelit, jaringan-jaringan kerja komputer korporasi, dan internet global.

Secara bersama, teknologi-teknologi ini memungkinkan transmisi informasi pada skala dan dengan kecepatan yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya. Dengan perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini, telah memungkinkan dilakukannya transfer modal dalam skala global. Demikian juga aliran-aliran barang melintasi batas-batas wilayah, kecepatan alirannya sangat ditentukan oleh perkembangan dunia transportasi. Kedua perkembangan ini telah menyumbangkan bagi terciptanya integrasi pasar-pasar nasional ke dalam pasar-pasar internasional dan global.

Kedua, Menyebar dan Meluasnya Kapitalisme

Pada tataran tertentu, globalisasi dapat dilihat sebagai perluasan kapitalisme global. Jan Aart Scholte dalam *International Affairs* (1997) mengungkapkan bahwa pada satu sisi, dinamika akumulasi surplus telah menjadi kekuatan besar di balik globalisasi sekarang ini. sementara di sisi yang lain, globalisasi dalam beberapa hal turut

menentukan cara kerja kapitalisme. Sebagai faktor penyebab utama, proses surplus akumulasi telah mendorong meningkatnya kebutuhan suprateritorial dalam tiga cara, yakni melalui pengejaran (a) jangkauan pasar yang lebih luas; (b) ongkos buruh yang lebih murah, pajak rendah, dan regulasi; dan (c) peluang-peluang baru akumulasi barang-barang tidak tersentuh, seperti informasi, percakapan telepon, dan produksi media massa yang sirkulasinya telah mengglobal.

Ketiga, Kemenangan Politik

Kemenangan ideologi neoliberal pada tahun 1980-an, dapat dianggap menjadi masa yang menentukan bagi meluasnya berbagai kebijakan neoliberal di seluruh dunia. Diawali di Inggris oleh Margaret Thatcher dan Amerika Serikat oleh Ronald Reagan, ideologi neoliberal pada akhirnya menjadi mainstream kebijakan ekonomi yang dianut oleh para ekonom dan politikus di hampir semua negara di dunia. Bahkan, melalui lembaga-lembaga governance global (Bank Dunia dan IMF) kebijakan yang bersandar pada ideologi neoliberal ini telah berusaha diinstitusionalisasi sedemikian rupa (Gill, 2000).

Dalam kaitan ini, tidaklah sulit untuk melihat bahwa *Stat-tara! Adjustment Programs (SAPs)* yang dirancang Bank Dunia dan IMF sebagai paket stabilisasi ekonomi dan tindakan-tindakan penghematan bagi negara-negara yang mengalami krisis atau memerlukan bantuan sebagai program yang dirancang berdasarkan gagasan-gagasan intelektual neoliberal (Sugiono, 1999).

Keempat, Hegemoni Ilmu Pengetahuan

Dari sudut pandang Gramscian, adopsi ideologi pasar di negara-negara berkembang secara serentak pada penghujung tahun 1970-an dan tahun 1980-an bisa dilihat sebagai cerminan formasi sebuah blok historis baru *hyper-liberalisme* yang merupakan asosiasi 'organik' atau intrinsik antara teori dan praktis politis; antara intelektual dan politisi (Sugiono, 1999). Dalam kaitan ini, telah terjadi transnasionalisasi pengetahuan. Transnasionalisasi ini berlangsung melalui bermacam-macam media, seperti pendidikan mahasiswa (ekonomi) pascasarjana dari negara-negara berkembang di universitas yang ide-ide kanan barunya dominan seperti Amerika Serikat dan Eropa sesudah-tahun 1970-an. Melalui media-media inilah, proses importasi ideologi neoliberal tersebut berlangsung. Para sarjana didikan ekonomi neoliberal inilah yang pada akhirnya menjadi teknokrat di negara masing-masing. Di Indonesia, pemah dikenal istilah "*Mafia Berkeley*" yang sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru, sedangkan di Cile dikenal sebagai "*Chicago Boys*". Mereka adalah sarjana-sarjana yang dididik di negara-negara dimana ideologi neoliberal tumbuh subur. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika sarjana-sarjana ini menjadikan ajaran neoliberal sebagai inspirasi utama dalam setiap pikiran dan tindakan.

Bagaimana Globalisasi Menyumbangkan Krisis Pembangunan?

Setelah mengenali karakteristik globalisasi dan faktor penggerakannya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana globalisasi neoliberal ini memberi sumbangan bagi terjadinya krisis pembangunan? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu untuk kembali ke konsep awal mengenai makna pembangunan dan karakteristik globalisasi, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Dengan kata lain, pertanyaan ini dapat

dijawab dengan melihat tujuan dan makna pembangunan pada satu sisi` dan karakteristik globalisasi neoliberal pada sisi yang lain.

Jika pembangunan dimaknai sebagai perluasan ruang kebebasan manusia sehingga pembangunan harus mampu menghilangkan segala macam hambatan ke arah pencapaian kebebasan tersebut, maka pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan fisik dan psikis sekaligus. Dengan demikian, jika pembangunan gagal meraih tujuan-tujuan itu, maka pembangunan tersebut dinyatakan gagal. Tidak menjadi soal, apakah suatu pembangunan direncanakan oleh Negara (*state-led development*) ataukah dikendalikan oleh pasar (*market-driven development*).

Dalam kaitan ini, globalisasi neoliberal yang mendorong pembangunan ke arah pendulum dominasi pasar atas negara telah menciptakan hambatan-hambatan di atas. Dengan kata lain, pembangunan yang sejatinya diarahkan untuk memperluas ruang kebebasan manusia justru telah menciptakan ketidakbebasan tersebut sebagai akibat rendahnya kualitas hidup dan marginalisasi politik, ekonomi, dan sosial dalam waktu bersamaan. Pada akhirnya, globalisasi neoliberal yang ditopang oleh kapitalisme global telah menciptakan dua krisis sekaligus, yakni krisis polarisasi kelas (*the crisis of class polarization*) dan krisis lingkungan (*ecological unsustainability*) (Sklair 2000). Krisis polarisasi kelas terjadi karena sejumlah perkembangan dari kelompok yang sangat kaya (*very rich*) dengan kelompok yang sangat miskin (*very poor*), dan menjajarnya kesenjangan diantara mereka. Polarisasi global telah mengalami peningkatan, kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin terus tumbuh meskipun kebijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi global yang mengesankan telah terjadi selama lebih dari lima puluh tahun sejak tahun 1945. Sementara itu, kesenjangan ekonomi tidak hanya terjadi antarnegara, tetapi juga mencakup orang. Kemiskinan, kelaparan, dan penyakit menular terus menyebar, dan kelompok perempuan masih menempati mayoritas masyarakat yang paling miskin di dunia (Thomas, 2001). Menurut Perkins (2004), dalam bukunya yang terkenal dan paling laris, *Confessions of An Economic Hit Man*, kondisi yang memprihatinkan ini disebabkan oleh ulah: *the little known inner workings of a system that foster globalizaton and leads to the impovetishment of millions of people across the planet.*

Dengan demikian, terbukti bahwa pasar tidaklah lebih efektif dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi dibandingkan dengan negara. Bahkan sebaliknya! seperti pernah diungkapkan oleh Polanyi (1944), pasar mempunyai efek destruktif yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan negara. Ini karena pasar bekerja untuk dirinya sendiri, akumulasi kekayaan untuk individu pemilik modal, sedangkan negara merupakan tindakan kolektif yang diorientasikan untuk mencapai kesejahteraan warga negara.

Jika dirunut secara mendalam. maka krisis pembangunan neoliberal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama dan yang paling utama, keyakinannya yang terlalu berlebihan terhadap kebajikan pasar dan kemampuan pasar dalam melakukan self-regulating. Berbagai kajian menunjukkan bahwa keberhasilan negara- negara industri maju adalah akibat pembangunan yang ditopang oleh intervensi negara yang efektif (Vartianen, 1995; Panic, 1995), dan sekaligus menunjukkan bahwa pasar saja tidak cukup untuk menopang pembangunan semacam itu (Broad, etol., 2000). Dalam kasus industrialisasi di Korea Selatan dan Taiwan, Wade (1995) menunjukkan bahwa kebijakan industri di kedua negara tersebut dicirikan oleh apa yang disebutnya sebagai

“*market governed*”, sebagai sistem yang dicirikan oleh kompetisi dan kerjasama antatperusahaan swasta, di bawah pengawasan negara, dan investasi di bidang pendidikan. Demikian juga yang terjadi pada periode pascaperang antara tahun 1950-an hingga tahun 1970-an, era yang lebih sering disebut sebagai “*the golden oge of growth*”. Salah satu keberhasilan pembangunan pada masa ini adalah masih efektifnya kontrol negara atas perekonomian nasionalnya, disamping terus berusaha meliberalisasi pasar-pasar domestiknya (Panic, 1995).

Kedua, berangkat dari kenyataan bahwa globalisasi berlangsung dalam kekuatan, intensitas, dan wilayah yang tidak seimbang. Negara-negara maju terus mendesak agenda privatisasi dan liberalisasi di negara-negara sedang berkembang, tetapi mereka sendiri terus melakukan proteksi terhadap ekonomi domestiknya, terutama di sektor pertanian. Mengomentari hal ini, Green dan Luehrmann (2003) mengemukakan, “*Ironically, for all their talk about “free trade”, it is subsidies and various protectionist measures by developed countries that are making it hardfor much of the third world to earn an hottest living through trade*”, dan menurut Bank Dunia, seandainya saja negara-negara maju menghapuskan semua hambatan perdagangan untuk melakukan impor dari Afrika maka nilai ekspor dari kawasan tersebut akan meningkat sebesar 14% (kenaikannya per tahun akan mencapai sekitar 2,5 milyar dollar Amerika Serikat). Selain itu, ketidakseimbangan semacam itu juga berdasarkan kenyataan bahwa globalisasi hanya berlangsung dalam suatu wilayah tertentu, terutama aliran investasi. Para pengritik globalisasi mengungkapkan bahwa persoalan pokok yang dihadapi dunia sekarang ini adalah distribusi *Foreign Direct Investment* (FDI) yang tidak terkendali dan timpang atau tidak simetris sehingga membatasi pertumbuhan ekonomi seluruh dunia, dan menghambat pertumbuhan output dan kesempatan kerja di negara-negara yang paling kaya karena terbatasnya permintaan efektif dari negara-negara miskin (Hirts and Thompson, 1996). Seandainya proses liberalisasi dan globalisasi berlangsung dalam kecepatan dan kekuatan yang kurang lebih seimbang. maka globalisasi mungkin akan mendorong kemakmuran yang lebih luas.

Ketiga, meningkatnya kesalingtergantungan. Globalisasi telah merongrong kekuasaan negara melalui integrasi pasar-pasar domestic mereka sehingga negara tidak lagi mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengontrol ekonomi nasional. Revolusi teknologi komunikasi telah membuat pasar-pasar nasional semakin terintegrasi dalam perekonomian global. Ini telah menciptakan kesalingtergantungan dan kesalinghubungan ekonomi nasional sehingga tidak ada satu negara pun yang mampu membuat kebijakan ekonomi dan politik tanpa mempertimbangkan negara lain atau aktor-aktor lain dalam lingkungan intemasional dan global.

Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi

Awal tahun 1990-an, dunia menyaksikan keruntuhan Uni Soviet, yang menjadi ancaman utama sistem demokrasi liberal. Keruntuhan itu menandai berakhirnya sistem politik satu partai yang dikembangkan sejak Vladimir Lenin berkuasa dan pernah mengalami masa kejayaannya. Sementara itu, negara-negara Dunia Ketiga, baik karena tekanan International Monetary Fund (IMF) atau World Bank, opini dunia, maupun tekanan-tekanan internal menjadi semakin berorientasi ke arah sistem demokrasi dan pasar bebas.

Globalisasi yang mulai banyak dibicarakan sejak era tahun 1980-an telah menimbulkan dampak besar terhadap seluruh dimensi kehidupan manusia. Dalam konteks politik negara, globalisasi telah mentransformasi kekuasaan politik negara modern dan warga negara. Beberapa pengamat menyatakan bahwa globalisasi pasar bebas akan mendorong demokratisasi politik, sedangkan kelompok lainnya mengatakan globalisasi telah menciptakan krisis demokrasi, atau bahkan kematian demokrasi (Winarno 2007). Dilatarbelakangi perdebatan semacam ini, menjadi menarik untuk mendiskusikan bagaimana hubungan globalisasi dan demokrasi di era sekarang. Pertanyaan yang layak didiskusikan adalah: apakah globalisasi membawa serta demokrasi ataukah sebaliknya, apakah globalisasi menghambat demokrasi dalam arti yang luas? Jika globalisasi membawa serta demokrasi, maka bagaimanakah proses tersebut berlangsung? Demikian juga sebaliknya, jika globalisasi menghambat demokrasi, maka pertanyaan selanjutnya adalah melalui mekanisme seperti apakah sehingga demokrasi di era global sekarang boleh dikatakan berada dalam situasi krisis? Jawaban terhadap pertanyaan ini mengandung interpretasi yang beragam, dan masing-masing kelompok mempunyai argumentasi sendiri yang sepintas masuk akal dan mengandung kebenaran.

Kerangka Konseptual

Globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesalinghubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern (Held 2000, 397). Perubahan-perubahan ini melibatkan sejumlah perkembangan yang dapat dipikirkan sebagai sesuatu yang mendalam, terjadi di waktu sekarang, dan melibatkan suatu transformasi struktural. Perubahan yang dimaksud di antaranya adalah rezim hak asasi manusia, yang memastikan bahwa kedaulatan nasional tidak dapat menjamin legitimasi suatu negara dalam hukum internasional; pergeseran lingkungan, dalam bentuk pemanasan global akibat kebocoran lapisan ozon; revolusi di bidang komunikasi dan teknologi informasi yang semakin memperluas jangkauan dan intensitas semua alat jaringan sosiopolitik dalam dan lintas batas teritorial negara bangsa; dan deregulasi pasar-pasar kapital yang semakin memperkuat kekuasaan

kapital dengan memberinya sejumlah pilihan untuk „keluar („*exit*“) dalam hubungannya dengan buruh dan negara.

Pada akhirnya, semua perubahan tersebut mempunyai implikasi terhadap kapasitas negara dalam melakukan regulasi (Held 2000, 398). Negara-negara bangsa tidak lagi otonom dalam melakukan pengambilan keputusan tanpa memerhatikan aktor-aktor lain di luar dirinya, baik dalam konteks nasional, regional, dan bahkan global. Dalam kaitan ini, globalisasi merupakan suatu proses yang mengejawantah ke dalam suatu transformasi ruang organisasi dari hubungan-hubungan dan transaksi sosial-yang dinilai berdasarkan tingkat *extensity*, *intensity*, *velocity*, dan dampaknya yang membawa aliran-aliran transkontinental atau interregional dan jaringan aktivitas, interaksi, dan penggunaan kekuasaan (Held 1999, 16). Dengan demikian, meskipun globalisasi mempunyai akar historis yang panjang, tetapi mempunyai besaran, intensitas, kecepatan, dan dampak yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa sebelumnya. Sebagai contoh, pada tahun 1950-an, ekspor dunia yang diukur dari GDP rasio telah meningkat dari di bawah 10 persen naik menjadi 15-20 persen pada 2000 ((Perraton *et al* 2000, 289). Di bidang keuangan, pergantian pasar pertukaran luar negeri telah meningkat dengan sangat besar melebihi US\$ 15 trilyun setiap harinya. Angka ini merupakan 10 kali dari jumlah perdagangan dunia pada 1979, dan sekarang 60 kali dari perdagangan dunia. Ini menunjukkan bahwa perdagangan dunia dan aliran modal global tidak hanya berlangsung lebih intensif, tetapi juga mempunyai tingkat kecepatan dan besaran yang jauh melampaui masa-masa sebelumnya. Tentunya, pergerakan perdagangan dan modal global ini akan mempunyai dampak yang serius terhadap perekonomian dalam negeri nasional masing-masing negara, terutama negara-negara yang telah mengintegrasikan diri ke dalam perekonomian global. Di sini, dampak globalisasi bagi ekonomi nasional akan berlangsung melalui tiga mekanisme, yakni tekanan perdagangan yang semakin kompetitif, multinasionalisasi produksi, dan integrasi pasar keuangan (Garrett 2000, 302). Pertama, menajamnya kompetisi perdagangan merupakan komponen utama dalam tesis-tesis globalisasi konvensional. Kompetisi ini telah diakui secara umum meskipun sebenarnya kompetisi itu tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga dalam memperebutkan investasi. Mekanisme kedua berhubungan erat dengan multinasionalisasi produksi dan berikutan ancaman perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat memindahkan lokasi produksinya dari satu negara ke negara lain dalam rangka mencari keuntungan terbesar. Multinasionalisasi produksi ini berakibat pada biaya-biaya produksi dan pemerintahan intervensionis. Pemerintahan nasional harus menerapkan kebijakan pasar bebas jika mereka ingin berkompetisi dalam memperebutkan investasi dan penyediaan tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Ketiga, dampak globalisasi terhadap ekonomi nasional terletak pada integrasi pasar finansial global. Integrasi pasar finansial global ini telah mengurangi sedemikian rupa otonomi ekonomi nasional mengingat aliran uang ini tidak dapat dikontrol oleh kekuatan negara manapun.

Pemahaman globalisasi sebagai proses integrasi ekonomi nasional ke dalam perekonomian global tampaknya menjadi konsep yang secara dominan diterima.

Banyak ahli yang menaruh minat dalam kajian globalisasi mendefinisikan globalisasi sebagai proses ekonomi meskipun pada dasarnya globalisasi tidak semata proses ekonomi. Sebaliknya, konsep globalisasi digunakan untuk menjelaskan bidang-bidang kegiatan ekonomi, politik, dan sosial yang melintasi batas-batas teritorial semacam itu. Akibatnya, keputusan dan aktivitas dalam suatu wilayah akan dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap individu di dunia yang mempunyai jarak cukup jauh (Held 1999, 15). Kuatnya pemahaman globalisasi sebagai proses ekonomi barangkali disebabkan oleh akibat-akibat integrasi ekonomi dan pasar keuangan global yang dimotori oleh kebijakan neoliberal di seluruh dunia. Kebijakan ini menyandarkan pada pasar bebas *laissez-faire*, yang perjuangan ideologisnya dimulai oleh kelompok Kanan Baru (*the New Right*) di Amerika Serikat dan Inggris. Implikasi globalisasi neoliberal ini telah menyentuh ke dalam hampir semua dimensi kehidupan manusia, yang menurut Herry Priyono merupakan wujud kolonisasi *homo economicus* atas *homo* yang lain dalam diri manusia (Priyono 2004, 8).

Wujud globalisasi neoliberal ini adalah diakuinya hukum darwinisme sosial¹ dalam tata kehidupan masyarakat di mana yang kuat akan berjaya, sedangkan yang lemah akan ditindas dan ditinggalkan (Bourdieu 2003, 28). Dalam tatanan neoliberal², normatif etis yang biasa disebut “kebaikan bersama” (*bonum commune*) tidak lagi dianggap sebagai tujuan yang secara intensional dikejar oleh agenda ekonomi-politik (*intended motive*), tetapi hanya sebagai hasil sampingan (*unintended consequences*) kinerja ekonomi politik (Priyono 2004, 8).

Selanjutnya, melalui pergeseran ini maka proses marginalisasi berjalan sempurna karena berbagai tujuan pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, tidak lagi dilihat sebagai tujuan yang secara intensional dikejar oleh kinerja ekonomi politik. Sebaliknya, yang dikejar oleh agenda ekonomi politik neoliberal adalah “the accumulation of individual wealth” (Priyono 2004, 8). Di sini, institusi yang pada abad 17 menjadi kekuatan ekonomi-politik dominan, yakni pemerintah, menjadi memudar. Salah satu implikasinya adalah kuatnya gagasan atomistik tentang “tanggung jawab” dalam konstelasi hubungan antara individu, pemerintah, dan bisnis. Bidang-bidang yang dulu merupakan tanggung jawab pemerintah dan perusahaan sekarang menjadi tanggung jawab individu sehingga terjadi pengusuran dari *social welfare* menjadi *self-care*. Dalam konteks ini, menurut Herry Priyono, proses marginalisasi akan berlangsung secara ganda, yakni kelompok-kelompok miskin tidak hanya tersingkir oleh kinerja prinsip “daya-beli-menentukan-hak”, tetapi penghapusan jaring pengaman apabila mereka jatuh. Berada di sisi lain, dan yang pada akhirnya mendapatkan imbas yang tidak kalah kecilnya adalah demokrasi politik. Demokrasi yang didefinisikan sebagai kebebasan untuk memformulasikan dan menganjurkan alternatif-alternatif politik bersamaan dengan kebebasan untuk berekspresi, kebebasan berbicara dan kebebasan dasar lainnya; kompetisi yang bebas dan tanpa kekerasan di antara pemimpin politik dengan secara periodik melakukan validasi terhadap hukum; memasukkan semua jabatan politik alternatif ke dalam proses-proses demokrasi; dan adanya ketentuan mengenai partisipasi semua anggota komunitas politik, apapun preferensi politik mereka (Carothers 1991, 7). Ini berarti demokrasi

mensyaratkan kebebasan untuk membentuk partai-partai politik dan melaksanakan pemilihan umum secara bebas dan jujur secara teratur tanpa mengecualikan jabatan-jabatan politik dari tanggung jawab secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam melihat hubungan antara globalisasi ekonomi dan demokrasi, ada tiga aliran pemikiran yang berkembang (Petras dan Veltmeyer 2002). Kelompok pertama adalah mereka yang melihat bahwa kapitalisme “bertentangan” dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa “muatan demokratis” demokrasi kapitalis adalah produk dari gerakan-gerakan rakyat dan perjuangan kelas, bukannya elemen integral dari ekspansi hubungan-hubungan pasar. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, hasil gabungan antara kapitalisme dan demokrasi tampak sebagai sebuah perkembangan kontradiktif yang ditopang oleh *equilibrium* politik di mana kekuatan-kekuatan demokrasi harus selalu waspada terhadap kecenderungan otoritarianisme yang inheren dalam kekuasaan kapitalis. Sementara itu, berbeda dengan pandangan pertama yang melihat demokrasi sebagai hasil perjuangan kelas dan bukannya elemen integral dari ekspansi pasar sehingga hubungan kapitalis dan demokrasi lebih bersifat kontradiktif, pandangan kedua berpendapat bahwa pertumbuhan kapitalisme dan demokrasi saling terkait. Di sini, pasar-pasar yang bebas dan pemilu yang bebas dipandang sebagai proses-proses yang saling memperkuat, atau yang satu dianggap sebagai penciptaan prakondisi-prakondisi untuk yang lainnya; liberalisasi ekonomi yang membesarkan kekuatan-kekuatan perkembangan ekonomi untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi demokrasi atau sebaliknya liberalisasi politik dan demokrasi menciptakan kondisi bagi pembangunan ekonomi (Sorensen 2003).

Menurut pemikiran ini, pasar-pasar bebas memperbanyak pilihan, menumbuhkembangkan individualisme, dan memajukan pluralisme sosial, semua bumbu yang penting bagi demokrasi. Karena itu, sebuah sistem politik yang demokratis dianggap sebagai sarana yang sangat diperlukan untuk menyelamatkan kondisi-kondisi kapitalisme yang dipandang sebagai bentuk paling efektif dan efisien pembangunan ekonomi. Menurut Petras dan Veltmeyer, baik pandangan kubu pertama maupun aliran pemikiran kelompok kedua, telah mendominasi perdebatan politik dan ekonomi sejak tahun 1960-an (Petras dan Veltmeyer 2002, 194). Namun, belakangan juga telah muncul aliran pemikiran ketiga yang berpendapat bahwa wacana-wacana teoritis yang berangkat dari kedua alur pemikiran di atas melupakan sentralitas “aturan main (politik)” yang mendefinisikan demokrasi yang independen yang berasal dari gerakan-gerakan rakyat atau pasar-pasar kapitalis. Mereka berpendapat bahwa kesepakatan sosial tentang aturan main persaingan politik akan menjamin bahwa kekuatan-kekuatan politik yang bersaing akan menerima hasil-hasil pemilu dan proses demokrasi yang lain dengan asumsi pemegang kekuasaan akan mempunyai kemampuan untuk mempertahankannya, sementara kelompok oposisi mempunyai peluang yang sama untuk memperebutkan kekuasaan tersebut. Pengelompokan yang dikemukakan oleh Petras dan Veltmeyer dalam melihat hubungan-hubungan globalisasi kapitalis mempunyai kelemahan karena akan melahirkan kecenderungan globalisasi direduksi hanya sebatas pada ekonomi. Padahal, globalisasi mencakup dimensi yang kompleks, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga politik, sosial, dan

bahkan budaya. Karena itu, pengelompokan ini kurang mampu mendeskripsikan dinamika demokrasi ketika konfigurasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya telah mengalami perubahan akibat globalisasi. Kekuasaan ekonomi politik telah bergeser dari yang berpusat pada negara ke berbagai institusi regional, global, dan masyarakat. Dengan berkaca pada kelemahan semacam itu, menjadi perlu kiranya untuk mengembangkan suatu tipologi lain dalam melihat hubungan-hubungan globalisasi dan demokrasi. Jika dianalisis secara seksama, maka para ilmuwan yang menaruh minat terhadap demokrasi dapat dibedakan ke dalam tiga aliran utama. Pertama, kelompok yang optimis dalam melihat perkembangan globalisasi dan demokrasi. Keruntuhan komunisme Uni Soviet membuat demokrasi liberal tidak lagi mempunyai pesaing utama sehingga, di era sekarang ini, sebagian besar negara-negara di dunia mengklaim sebagai negara demokratis, dan setiap orang mengaku dirinya sebagai demokrat. Negara-negara Eropa Timur dan Rusia kini juga mulai mengadopsi sistem demokrasi, dan tuntutan ke arah diberlakukannya demokrasi terjadi di mana-mana sehingga negara-negara di dunia kini tengah melangkah ke arah apa yang disebut Fukuyama sebagai „*the ideal state*“, yakni demokrasi liberal (Fukuyama 2003, 1).

Kelompok kedua adalah para pemikir yang cenderung pesimis dan bahkan skeptis dalam melihat demokrasi. Keberatan yang diajukan oleh kelompok ini disebabkan oleh menguatnya kekuatan korporasi beserta elit-elit ekonomi transnasional yang kini sangat berkuasa. Globalisasi ekonomi didominasi oleh korporasi-korporasi global yang tidak dapat dikontrol sebagai aktor kunci, yakni *transnational corporations*. Yeates (2002, 70) mengemukakan bahwa globalisasi telah menghadirkan ekonomi global yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan global yang tidak dapat dikontrol sebagai aktor kunci, yakni *transnational corporations*. Perusahaan-perusahaan transnasional ini dan sekutu mereka merupakan aktor-aktor politik, dan mereka menuai kesuksesan besar dalam menyampaikan pesan ke seluruh dunia bahwa tidak ada alternatif lain kecuali melalui jalan kapitalisme global. Jalan ke arah kemakmuran bersama ini, sebagaimana sering diargumentasikan oleh para korporat, adalah melalui kompetisi internasional yang diputuskan melalui *'free' market* dan *'free' trade*, lembaga dan proses melalui mana mereka mengontrol baik melalui diri mereka sendiri maupun melalui sekutu mereka di tingkat lokal, nasional, regional, dan global (Sklair 2002, 155). Menurut Robinson, agen-agen ekonomi global ini adalah elit transnasional baru. Elit-elit ini mengendalikan sistem keputusan dan secara cepat memonopoli kekuasaan masyarakat global melalui dominasi politik. Akibatnya, demokrasi yang dipromosikan oleh kelompok-kelompok ini lebih merupakan demokrasi poliarkhis. Suatu sistem yang merujuk pada adanya sekelompok kecil yang benar-benar memiliki kekuasaan dan terikat langsung dalam pembuatan kebijakan, sembari hanya memberi kesempatan kelompok mayoritas pemilih mereka bersaing dalam pemilihan umum yang diawasi secara ketat. Robinson menyebutnya sebagai tipe “demokrasi pura-pura” yang sama sekali tidak melibatkan kekuasaan (*cratos*) dari massa rakyat (*demos*). Kekuasaannya berakhir setelah kelompok elite kecil berkuasa dan menyebabkan semakin menganganya kesenjangan akibat ekonomi global (Robinson 2003, 6-7). Kelompok pemikir ketiga adalah para ilmuwan yang lebih optimis, tetapi dengan mengajukan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi

jika demokrasi hendak dipertahankan. Tesis mereka dikembangkan berdasarkan kenyataan bahwa globalisasi telah sedemikian rupa mengurangi kedaulatan dan otonomi negara nasional. Globalisasi telah mendorong terjadinya integrasi ekonomi nasional ke dalam perekonomian global, menciptakan kesalinghubungan dan kesalingtergantungan antarsubsistem sehingga keputusan yang diambil oleh suatu negara bangsa akan memengaruhi negara bangsa lain, demikian juga sebaliknya.

Sementara itu, globalisasi ekonomi telah memunculkan suatu bentuk tantangan baru dan kesadaran baru akan pentingnya kerja sama regional sebagai usaha untuk menjawab tantangan yang dimaksud. Menurut pandangan ini, persoalan-persoalan yang muncul ke permukaan dan mempunyai imbas terhadap negara bangsa dalam suatu kawasan hanya dapat diselesaikan melalui kerjasama multilateral antarnegara bangsa, dan mereka hanya akan dapat mengambil keuntungan ekonomi dari ekonomi global jika bekerja sama satu dengan yang lain dalam satu kawasan (Coleman dan Underhill 1998). Akibat perubahan-perubahan ini adalah menipisnya batas-batas teritorial negara bangsa karena persoalan-persoalan menyangkut ruang dan waktu telah teratasi sebagai akibat revolusi teknologi komunikasi dan semakin rendahnya biaya transportasi dan ketergantungan negara bangsa yang semakin kompleks (Harvey 2000). Interdependensi telah mengurangi otonomi dan kedaulatan negara. Karena itu, model negara Westphalian tidak lagi memadai untuk mendeskripsikan begitu banyak entitas yang disebut sebagai negara bangsa (Krasner 2000, 124).

David Held (1995, 135) mengemukakan lima keterputusan (*disjuncture*) pokok yang menyoroti pola-pola kekuasaan dan tekanan yang berubah yang sedang mendefinisikan kembali arsitektur kekuasaan politik yang berhubungan dengan negara bangsa.³ Pertama, hukum internasional. Perkembangan hukum internasional telah menempatkan individu, pemerintahan, dan organisasi nonpemerintah di bawah sistem pengaturan resmi yang baru. Hukum internasional mengakui kekuasaan dan tekanan, hak dan kewajiban, yang mengatasi klaim-klaim negara bangsa dan yang, meskipun dalam pelaksanaannya mereka tidak bisa didukung oleh institusi-institusi dengan keputusan memaksa. Kedua, internasionalisasi pembuatan keputusan politik. Menurut Held, wilayah utama keterputusan kedua antara teori negara berdaulat dan sistem global kontemporer terletak pada rezim-rezim dan organisasi-organisasi internasional yang sangat banyak yang dibentuk untuk, pada prinsipnya, mengatur keseluruhan bidang kegiatan transnasional (perdagangan, kelautan, ruang angkasa, dan sebagainya) dan masalah-masalah kebijakan kolektif. Perkembangan rezim-rezim dan organisasi-organisasi internasional telah membawa perubahan-perubahan penting dalam struktur pengambilan keputusan politik dunia. Bentuk-bentuk baru politik multilateral dan multinasional telah terbentuk dan bersamaan dengan itu terbentuk pula pola khusus pembuatan keputusan kolektif yang melibatkan pemerintahan nasional, *International Government Organization* (IGO), dan berbagai kelompok penekan transnasional serta *International Non-Governmental Organization* (INGO).

Ketiga, kekuasaan hegemoni dan struktur keamanan internasional. Tumbuhnya kekuatan hegemonik, munculnya aktor militer dan perkembangan negara-negara global, yang dicirikan oleh kekuasaan-kekuasaan besar dan blok-blok kekuasaan, kadang-kadang mengurangi otoritas dan integritas negara. Penempatan negara individu dalam hierarki kekuasaan global menentukan tekanan dan jenis-jenis pertahanan dan kebijakan luar negeri yang bisa dicari oleh pemerintah, khususnya pemerintah yang dipilih secara demokratis. Keempat, identitas nasional dan globalisasi budaya. Konsolidasi kedaulatan negara pada abad ke-18 dan ke-19 membantu perkembangan identitas rakyat sebagai subyek politik -sebagai warga negara. Ini berarti bahwa orang-orang yang tunduk kepada otoritas sebuah negara secara perlahan menjadi sadar akan hak keanggotaan mereka dalam suatu masyarakat dan sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bisa diberikan keanggotaan semacam itu. Kelima, ekonomi dunia. Dalam konteks ini, terdapat keterputusan yang jelas antara otoritas formal negara dan jangkauan sistem produksi, distribusi, dan pertukaran kontemporer yang sering berfungsi membatasi wewenang dan keefektifan otoritas politik nasional. Kemajuan teknologi dalam teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi tengah menghilangkan batas-batas di antara pasar yang terpisah -batas-batas yang merupakan prasyarat utama bagi kebijakan ekonomi nasional yang independen (Keohane dan Nye 1991 dalam Held 1995, 130).

Ancaman Globalisasi dan Perkembangan Demokrasi

Perdebatan yang muncul berkaitan hubungan globalisasi dan demokrasi bermula pada dua persoalan yang bertolak belakang. Pendapat pertama mengatakan bahwa globalisasi mengancam demokrasi. Sebaliknya, pendapat kedua menyatakan bahwa globalisasi mengembangkan demokrasi. Untuk mengukur hal itu tergantung pada seberapa besar ruang gerak yang diberikan globalisasi kepada demokrasi. Di sini, ada dua kriteria yang dapat diajukan, yakni konsep otonomi dan kesetaraan. Globalisasi akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi tergantung pada apakah globalisasi mendorong terciptanya otonomi dan kesetaraan yang lebih luas diantara individu dan masyarakat. Jika globalisasi ternyata mampu mendorong otonomi dan kesetaraan yang lebih luas, maka globalisasi dianggap akan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi demokrasi. Sebaliknya, jika globalisasi justru menghambat kedua hal tersebut, maka globalisasi dapat dianggap sebagai ancaman bagi demokratisasi politik.

Menurut David Held, prinsip otonomi merupakan inti proyek demokrasi. Pandangan mengenai negara legal demokratis adalah dasar untuk memecahkan ketegangan yang muncul antara gagasan negara modern dan gagasan demokrasi. Dalam konteks itu, demokrasi kosmopolitan merupakan suatu konsepsi hubungan legal demokratis yang disesuaikan secara tepat dengan dunia bangsa-bangsa yang terjerat dalam jaringan proses regional dan global (Held 1995, 145). Ketiga konsep ini (prinsip otonomi, negara legal demokratis, dan demokrasi kosmopolitan) merupakan suatu kerangka kerja baru yang tidak bisa dipungkiri bagi pengembangan suatu teori demokrasi. Jika demokrasi berarti "pemerintahan oleh rakyat", yakni penentuan pembuatan keputusan publik oleh anggota-anggota

komunitas politik yang sama-sama bebas, maka dasar pembenarannya terletak pada kemajuan dan peningkatan otonomi, baik bagi individu-individu sebagai warga negara maupun bagi kolektivitas. Held berpendapat bahwa otonomi mengandung pengertian kemampuan manusia untuk melakukan pertimbangan secara sadar diri, melakukan perenungan diri, dan melakukan penentuan diri. Otonomi mencakup kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan, memilih, dan melakukan (atau mungkin tidak melakukan) tindakan yang berbeda baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik dengan memahami kebaikan demokrasi atau kebaikan umum (Held 1995, 146). Prinsip otonomi ini mengandung dua gagasan pokok. Pertama, rakyat seharusnya memegang peranan penentuan diri. Kedua, pemerintahan demokratis harus menjadi pemerintahan yang terbatas, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi kekuasaan yang dibatasi secara resmi (Held 1995, 147). Kesetaraan merujuk pada konsepsi politik bahwa individu harus mempunyai kesamaan politik yang setara agar proses politik berjalan demokratis. Jika kesetaraan semakin lebar, maka proses demokratis juga akan semakin berkurang. Ketidaksetaraan yang bersumber dalam kapitalisme pasar menghasilkan ketidaksetaraan yang serius dalam politik di antara warga negara (Dahl 1998, 178). Ini terjadi karena penguasaan sumber-sumber ekonomi langka dalam masyarakat pada akhirnya juga merepresentasi dalam bentuk penguasaan politik. Akibatnya, orang-orang yang mempunyai kekayaan lebih akan mempunyai peluang lebih besar untuk memengaruhi proses-proses politik. Pada akhirnya, ketidaksetaraan dalam ekonomi akan mengakibatkan ketidaksetaraan politik. Dalam kaitannya dengan kedua hal ini, otonomi dan kesetaraan, tampaknya globalisasi memberikan sumbangan yang tidak begitu bagus. Para pemikir kritis telah dengan tajam menganalisis bagaimana globalisasi menciptakan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan karenanya memberikan kontribusinya yang buruk bagi demokrasi. Seperti dikemukakan Korten:

Korporasi telah muncul sebagai institusi pengendali yang dominan di planet ini, dengan yang terbesar di antara mereka menjangkau hampir semua negara di dunia dan memiliki ukuran dan kekuatan yang lebih besar daripada kebanyakan pemerintahan. Makin lama, kepentingan korporatlah dan bukan kepentingan manusia, yang menentukan agenda politik badan-badan negara dan internasional meskipun realitas ini dan implikasinya sebagian besar tidak disadari (Korten 1997, 90). Lebih lanjut, Korten mengemukakan bahwa saling berkaitan dengan pembicaraan politik tentang pasar bebas dan perdagangan bebas adalah sebuah pesan bahwa kemajuan pasar bebas adalah kemajuan demokrasi. Di tengah semakin meningkatnya perasaan tidak percaya kepada pemerintah, pesan ini terasa sangat meyakinkan. Pesan ini mengandung suatu kebenaran penting bahwa pasar dan politik memang menyangkut penguasaan, kekuatan, dan alokasi sumber daya masyarakat. Jika pasar semakin bebas dan semakin mengglobal, kekuatan untuk menguasai semakin berpindah dari pemerintah ke korporasi global (Korten 2002, 107-109). Korten menggambarkan bagaimana demokrasi dikalahkan oleh kapitalisme sebagaimana dapat dilihat dalam kutipan berikut. Pada tahun 1980-an, kapitalisme menang atas komunisme. Tahun 1990-an, kapitalisme menang lagi atas demokrasi dan ekonomi pasar. Bagi sementara orang, di antara kita yang tumbuh dan dibesarkan dengan keyakinan bahwa kapitalisme merupakan pondasi

demokrasi dan pasar bebas, pasti akan terkejut ketika mengetahui bahwa dalam kapitalisme, demokrasipun dapat dijual kepada penawar tertinggi, dan bahwa pasar bebas itu sebenarnya direncanakan secara terpusat oleh megakorporasi global yang ukurannya lebih besar dari banyak negara yang ada (Korten 2002, 74). Kekhawatiran menguatnya pengaruh korporasi terhadap entitas politik negara dapat dilihat dalam dua sudut pandang berbeda, tetapi saling berkaitan. Pertama, kemampuan memengaruhi perusahaan-perusahaan multinasional dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Pada akhir 1980-an, korporasi-korporasi Jepang mengeluarkan sekitar \$ 100 juta setahun untuk lobi politik di Amerika Serikat (AS) dan \$ 300 juta lagi untuk membangun jaringan politik rakyat jelata guna memengaruhi opini masyarakat. Dalam kategori berbeda, tetapi mempunyai kesamaan substansi, adalah bagaimana Pemerintah Meksiko mengeluarkan lebih dari \$ 25 juta dan merekrut banyak pelobi Washington terkemuka untuk mendukung kampanye NAFTA (Korten 2002, 224). NAFTA adalah representasi regionalisme ekonomi yang menegaskan bagaimana negara nasional secara sistematis memfasilitasi perusahaan-perusahaan multinasional untuk melakukan perdagangan lebih intensif dalam suatu kawasan.

Dalam kaitannya dengan politik warga negara, terdapat hubungan yang asimetris antara perusahaan-perusahaan multinasional dan warga negara lainnya pada satu sisi, dan hubungan-hubungan mereka dengan negara pada sisi yang lain. Apa yang dikhawatirkan Korten ketika mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional tengah merepresentasikan dirinya menjadi kekuasaan politik dilihat dalam konteks ini. Kebanyakan perusahaan multinasional mempunyai unit departemen tersendiri yang mampu melakukan lobi-lobi intensif kepada pemerintahan nasional sehingga kebijakan pemerintah dijamin tidak akan merugikan kepentingan mereka. Inilah yang menyebabkan pemerintah cenderung melindungi kepentingan korporasi jika terjadi konflik antara buruh dengan perusahaan. Kemampuan lobi yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional inilah yang menjadi awal kehancuran demokrasi representatif karena pemerintahan nasional terlegitimasi yang terbentuk atas pilihan rakyat lebih mementingkan kepentingan korporasi dibandingkan dengan membuat keputusan politik yang menguntungkan warga negara. Globalisasi juga menyumbangkan ketimpangan ekonomi yang semakin luas dan tajam. Pada pertengahan 1990-an, dengan mengambil garis kemiskinan yang ekstrim dengan menyejajarkan konsumsi per hari dengan satu dollar AS, sekitar 33 persen penduduk dunia yang berada di negara-negara sedang berkembang berada dalam kesengsaraan. Dalam masyarakat miskin ini, sekitar 550 juta berada di Asia Selatan, 215 juta berada di Sub-Sahara Africa, dan 150 juta berada di Amerika Latin (Castel 2000). Sementara itu, International Labour Organization (ILO) memperkirakan bahwa persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan meningkat dari 53,5 persen di tahun 1985 menjadi 54 persen di tahun 1990 di Sub-Sahara Afrika, meningkat dari 23 persen menjadi 27,8 persen di Amerika Latin, menurun dari 61,1 persen menjadi 59 persen di Asia Selatan, serta menurun dari 15,7 persen menjadi 14,7 di Asia Tenggara dan Asia Timur. Sejalan dengan meluasnya jumlah orang miskin di dunia dan kesenjangan yang semakin melebar, kondisi di bidang jaminan kesehatan juga semakin sama buruknya. Sejak

1990, usia harapan hidup menurun di 33 negara. Pada 1997, angka kematian di bawah usia lima tahun di negara-negara terkaya adalah 8 berbanding 1000 lahir hidup, sedangkan di negara-negara sedang berkembang 169 berbanding 1000 lahir hidup (Bank Dunia 1999, 31).

Kesenjangan ternyata tidak hanya terjadi antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin. Kesenjangan dalam pendapatan dan kesejahteraan ternyata juga terjadi dalam negara maju. *The United States Census Bureau, Supplemental Income Inequality Table 2001* menegaskan bahwa sepanjang 1967-1980, ketimpangan pendapatan di AS sebenarnya mengalami penyusutan. Ini terbukti dari pendapatan rumah tangga termiskin yang mengalami peningkatan sebesar 6,5 persen dari total pendapatan. Sementara itu, seperlima pendapatan rumah tangga terkaya dari keseluruhan jumlah penduduk menyusut hingga 10 persen. Namun pada 1980, keadaan berbalik drastis. Seperlima jumlah rumah tangga termiskin kehilangan sebanyak 11,6 persen pendapatan, dan seperlima rumah tangga terkaya memperoleh peningkatan hampir 20 persen. Pada periode 1990-an, ketimpangan menjadi semakin parah. Seperlima jumlah rumah tangga kaya senantiasa merasakan peningkatan pendapatan (Bank Dunia 1999, 31). Kesenjangan dalam hal kekayaan ini paralel dengan kesenjangan pendapatan masyarakat di AS. Laporan yang sama menyebutkan bahwa antara 1947-1973, pendapatan rata-rata para pekerja AS meningkat lebih dari dua kali lipat. Sementara pekerja di tingkat paling bawah, yang jumlahnya 20 persen, menikmati jumlah keuntungan yang paling besar. Namun, sejak 1973, pendapatan rata-rata pekerja merosot sekitar 15 persen. Sementara, 20 persen pekerja di tingkat paling bawah, terpuruk dan tertinggal jauh di belakang. Dari seluruh pendapatan, lebih dari 40 persen-nya masuk ke kantong orang yang paling kaya, yang jumlahnya hanya sebesar 1 persen. Pelajaran yang dapat diambil dari fakta dan data di atas adalah globalisasi neoliberal ternyata gagal menciptakan kemakmuran. Bahkan sebaliknya, globalisasi telah membuat kesenjangan dalam hal pendapatan dan kesejahteraan semakin merosot. Bagi demokrasi, kemiskinan dan kesenjangan dalam pendapatan akan mengurangi derajat kesetaraan politik dan otonomi warga negara. Dengan demikian, globalisasi neoliberal lebih cenderung menciptakan krisis bagi demokrasi dibandingkan dengan mendorong ke arah penciptaan demokrasi yang luas dan stabil. Globalisasi juga telah membuka peluang bagi munculnya kekuasaan transnasional dalam bentuk perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi lintas batas negara. Kekuasaan korporasi ini melebihi kekuatan yang dimiliki beberapa negara nasional. Mereka mampu memengaruhi keputusan-keputusan politik negara sehingga demokrasi tidak lagi diorientasikan untuk kepentingan warga negara, tetapi demi kepentingan korporasi.

The Deepening Democracy dan Democratizing Democracy

Meluasnya kemiskinan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan baik di dalam maupun antarwarga negara sebagai akibat globalisasi neoliberal telah membuat demokrasi dalam krisis. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa globalisasi tidak mempunyai sumbangan apapun bagi demokrasi. Setidaknya, globalisasi informasi telah mendorong menyebarnya ide-ide tentang demokrasi ke seluruh dunia. Sementara itu, daya tahan rezim-rezim otoriter yang menindas juga akan diuji oleh banyak tekanan internasional sebagai akibat globalisasi informasi. Demikian juga dengan kekuatan-kekuatan nonpemerintah yang kini mulai terlibat aktif dalam

mendorong demokrasi politik. Mereka mempunyai jaringan di seluruh dunia guna saling menguatkan satu dengan lainnya. Konferensi dan seminar antarggerakan demokrasi di seluruh dunia telah banyak dilakukan dan menjadi inspirasi bagi gerakan demokrasi di negara-negara otoriter. Sementara bagi negara-negara demokrasi, yang diperlukan adalah pendalaman demokratisasi itu sendiri. Dalam *The Runaway World*, Anthony Giddens mengemukakan bahwa apa yang dibutuhkan di negara demokratis adalah pendalaman demokrasi (*a deepening democracy*) itu sendiri. Giddens menyebutnya sebagai demokratisasi atas demokrasi (*democratizing democracy*). Namun, demokrasi dewasa ini juga harus bersifat transnasional. Menurut Giddens, pendalaman demokrasi dibutuhkan karena mekanisme lama pemerintahan tidak berjalan dalam sebuah masyarakat di mana warga negaranya hidup dalam informasi yang sama dengan yang berkuasa. Pemerintahan demokratis Barat tentu saja tidak pernah sedemikian menyimpan rahasia sebagaimana di negara-negara komunis atau tipe pemerintahan otoriter lainnya. Namun, dalam beberapa konteks, mereka sudah tentu mempunyai rahasia. Selain itu, sistem demokrasi Barat juga telah menggunakan jaringan pertemanan (kroni), kolusi, dan politik uang serta kesepakatan-kesepakatan terselubung. Mereka seringkali menggunakan simbolisme tradisional dan bentuk-bentuk tradisional kekuasaan yang tidak demokratis (Giddens 2002, 74-75). Demokratisasi atas demokrasi ini akan mengambil bentuk yang berbeda-beda dalam berbagai negara, tergantung pada latar belakang masing-masing. Demokratisasi demokrasi seringkali mengimplikasikan reformasi konstitusional dan pengembangan transparansi dalam urusan politik. Selain itu, perlu adanya eksperimen dengan prosedur demokrasi alternatif, khususnya jika prosedur semacam ini dapat membuat keputusan politik yang dekat dengan kepentingan warga sehari-hari. Untuk itu, partai politik harus terbiasa menjalin kerja sama dengan kelompok berisu tunggal, seperti kelompok penekan yang peduli lingkungan hidup. Selain itu, demokratisasi atas demokrasi juga bergantung pada upaya mengembangkan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang kuat karena pasar tidak dapat menghasilkan budaya semacam itu. Begitu pula halnya keragaman kelompok dengan kepentingan khusus.

Menurut Giddens, perlu dipahami bahwa tidak hanya ada dua sektor dalam masyarakat, yaitu negara dan pasar, atau wilayah publik dan wilayah perorangan. Namun, di antara keduanya, terdapat pula masyarakat sipil, termasuk keluarga dan lembaga nonekonomi lainnya (Giddens 2002, 36-37). Di tingkatan global, transformasi politik yang menyusul bersamaan dengan tumbuhnya kesalinghubungan (*interconnectedness*) di antara negara dan masyarakat serta semakin meningkatnya intensitas jaringan internasional memerlukan suatu pengujian kembali atas teori politik dalam bentuk dan ruang lingkup yang sama fundamentalnya, seperti perubahan yang menghasilkan inovasi konseptual dan institusional negara modern itu sendiri (Held 1995, 143). Karena itu, penting kiranya dikemukakan suatu gagasan baru yang dapat digunakan untuk menjelaskan transformasi sosial politik yang tengah berlangsung, terutama kaitannya dengan kedaulatan negara demokrasi modern. Meskipun pandangan kaum skeptis mengatakan bahwa globalisasi tidak menghancurkan sama sekali - tetapi hanya mengurangnya saja - kedaulatan negara nasional sebagaimana diyakini kaum hiperglobalis, namun yang jadi persoalan adalah globalisasi telah mengartikulasikan kewajiban dan kekuasaan negara bangsa dalam suatu cara yang kompleks, yang melibatkan perkembangan ke arah menyebarnya kekuasaan dunia

dan diiringi oleh menyebarnya otoritas dan bentuk-bentuk pengaturan yang kompleks. Dalam kaitan ini, Held menyebutkan terjadinya “*the reconfiguration of political power*” (Held 2001). Demokrasi kosmopolitan merupakan pemahaman baru tentang demokrasi sambil memperhitungkan *interlocking* proses-proses politik dan ekonomi pada level lokal, nasional, dan global. Redefinisi demokrasi yang sifatnya lintas batas negara itu bertujuan agar isu-isu yang dewasa ini berada di luar jangkauan *nation state*, seperti aliran kapital global, beban utang negara-negara berkembang, krisis ekologi, dan masalah keamanan internasional dapat ditundukkan pada kontrol demokrasi demi kepentingan kemanusiaan yang lebih universal (Jemadu 2001). Demokrasi kosmopolitan perlu didukung oleh keadilan distributif (*distributive justice*). Ini diberikan untuk memberikan legitimasi kepada lembaga-lembaga pemerintahan global dan tatanan dunia pada saat negara mendapatkan penekanan kembali. Pendekatan kosmopolitan ini mengandung pengertian bahwa kahidupan politik akan mempunyai aspek global dan lokal sekaligus. Dengan demikian, akan terjadi demokratisasi ganda (*double-democratized*). Demokrasi akan diperkuat di tingkat nasional dan organisasi-organisasi internasional, baik melalui masyarakat sipil maupun melalui wakil-wakilnya (Qadhafi 2005).

Selanjutnya, agar model demokrasi kosmopolitan ini dapat dilaksanakan, terdapat beberapa proses yang harus berlangsung. Pertama, model demokrasi kosmopolitan akan mencari kubu hukum demokratis kosmopolitan guna memberikan bentuk dan batas-batas bagi pembuatan keputusan politik. Hukum demokratis kosmopolitan ini dipahami sebagai suatu wilayah hukum dalam jenis yang berbeda dari hukum yang dibuat antara satu negara dan negara lain, yaitu hukum internasional. Held mengambil konsep hukum kosmopolitan ini dari Immanuel Kant yang menyatakan bahwa hukum kosmopolitan adalah suatu cara memahami hukum yang tidak fantastis dan tidak pula utopis, tetapi suatu “pelengkap yang perlu” bagi aturan tidak tertulis hukum nasional dan internasional yang ada, dan suatu sarana untuk mentransformasikan hukum internasional menjadi hukum kemanusiaan publik (Held 1995). Ini karena tempat-tempat kekuasaan bisa saja terdapat di lingkungan nasional, transnasional, dan internasional, yang mana kekuasaan ini menjadi ancaman potensial terhadap demokrasi karena kemampuannya dalam membatasi otonomi. Karena itu, hukum publik demokratis dalam suatu komunitas politik memerlukan hukum demokratis dalam lingkungan internasional. Menurut Held, hukum publik demokratis ini perlu ditunjang oleh struktur hukum internasional yang ia sebut sebagai hukum demokratis kosmopolitan. Untuk itu, hukum demokratis kosmopolitan perlu dimasukkan ke dalam konstitusi-konstitusi parlemen dan majelis-majelis, baik pada tingkat nasional maupun internasional; dan pengaruh pengadilan internasional ini diperluas agar kelompok dan individu mempunyai sarana yang efektif untuk menuntut otoritas politik bagi penetapan dan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pokok, baik di dalam maupun di luar perhimpunan politik. Kedua, searah dengan perkembangan ini, model demokrasi kosmopolitan akan mengusahakan terciptanya lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif transnasional yang efektif pada tingkat regional dan global, yang terikat oleh syarat-syarat hukum demokratis pokok.

Kesimpulan

Tulisan ini berusaha mendiskusikan hubungan-hubungan antara globalisasi dan demokrasi, tepatnya bagaimana globalisasi memberikan sumbangan positif bagi demokrasi, atau sebaliknya menciptakan krisis demokrasi. Bagi demokrasi, globalisasi akan menyumbangkan dua sisi sekaligus, yakni mendorong proses demokratisasi dan sekaligus menciptakan krisis. Ketimpangan dan menguatnya kekuatan korporasi telah menciptakan ketidaksetaraan politik, dan karenanya menciptakan krisis demokrasi. Sementara itu, perkembangan teknologi komunikasi telah mendorong kemunculan ide dan gerakan demokrasi transnasional, dan dalam situasi semacam ini proses demokratisasi akan berlangsung. Negara-negara otoriter akan menghadapi tantangan berat dari globalisasi informasi, dan mau tidak mau mereka harus membuka diri bagi proses demokrasi politik. Usaha yang barangkali perlu dilakukan di era globalisasi sekarang ini adalah bagaimana melakukan demokratisasi atas demokrasi. Ini akan mengambil bentuk yang berbeda-beda dalam berbagai negara, tergantung pada latar belakang masing-masing. Demokratisasi demokrasi seringkali mengimplikasikan reformasi konstitusional, dan pengembangan transparansi dalam urusan politik. Selain itu, perlu adanya eksperimen dengan prosedur demokrasi alternatif, khususnya jika prosedur semacam ini dapat membuat keputusan politik dekat dengan kepentingan warga sehari-hari. Gagasan demokrasi kosmopolitan mungkin bisa menjadi proyek bersama meskipun tampaknya akan menghadapi kendala yang tidak sedikit. Demokrasi akan berjalan lebih baik dalam lingkup kecil dan semakin akan berkurang jika berada dalam lingkup yang lebih besar.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

Carothers, Thomas, 1991. *In The Name of Democracy: US Policy Toward Latin America in the Reagan Years*. San Francisco: University of California Press.

Castel, Manuel, 2000. "The Rise of the Fourth World", dalam David Held and Anthony McGrew (eds.), 2000. *The Global Transformations: A Reader*. Cambridge: Polity Press.

Coleman, William D. dan Geoffrey R.D. Underhill, 1998. "Introduction: Domestic Politics, Regional Economic Cooperation and Global Economic Integration", dalam William D. Coleman and Geoffrey R.D. Underhill (eds.), 1998. *Regionalism and Global Economic Integration: Europe, Asia, and the Americas*. London and New York: Routledge.

Dahl, Robert, 1998. *On Democracy*. Yale University Press. Giddens, Anthony, 2002. *The Runaway World*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fukuyama, Francis, 2003. *The End of History and the Last Man*. Yogyakarta: Qalam.

Garrett, Geoffrey, 2000. "Global Markets and National Politics", dalam David Held and Anthony McGrew (eds.), 2000. *The Global Transformations: A Reader*. Cambridge: Polity Press.

Harvey, David, 2000. "Time-Space Compression and the Postmodern Condition", dalam David Held and Anthony Mc Grew (eds.), 2000. *The Global Transformations: A Reader*. Cambridge: Polity Press.

Held, David, 1995. *Democracy and the Global Order*. California: Stanford University Press. _____, et al., 1999. *Global Transformations: Politics, Economic, and Culture*. California: Stanford University Press.

Hertz, Noreena, 2003. *Global Capitalism and the Death of Democracy*. New York: HarperCollins Publishers Inc.

Korten, David, 1997. *When Corporations Rule The World (Bila Korporasi Menguasai Dunia)*. Jakarta: Profesional Books. _____, 2002. *The Post Corporate World: Life After Capitalism The Post Corporate World: (Kehidupan Setelah Kapitalisme)*. terj. A. Rahman Zainudin. Jakarta: Yayasan Obor.

Krasner, 2000. "Compromising Westphalia", dalam David Held and Anthony Mc Grew (eds.), 2000. *The Global Transformations: A Reader*. Cambridge: Polity Press.

Perraton, Jonathan et al., 2000. "Economic Activity in A Globalizing World", dalam David Held and Anthony McGrew (eds.), 2000. *The Global Transformations: A Reader*. Cambridge: Polity Press.

Petras, James dan Henry Veltmeyer, 2002. *Imperialisme Abad 21*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Robinson, William I., 2003. "Neoliberalisme, Elit Global, dan Transisi Guatemala: Sebuah Analisis Kritis Makrostruktural", dalam William I. Robinson (ed.). *Hantu Neoliberalisme*, Jakarta: C-Books.

Sklair, Lesly 2001, *Globalization: Capitalism and Its Alternative*. Oxford University Press.

Sorensen, Georg. 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Dunia yang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan CCSS.

Winarno, Budi, 2007. *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*. Yogyakarta: MedPress.

Artikel Jurnal

Bourdieu, Pierre, 2003. "Kritik terhadap Neoliberalisme: Utopia Eksploitasi Tanpa Batas menjadi Kenyataan", *Basis*, **52** (11-12), November-Desember 2003.

Held, David, 2000. "Regulating Globalization? The Reinvention Politics". *International Sociology*, **15** (2): 394-408

Priyono, Herry, 2004. "Marginalisasi ala Neoliberal", *Basis*, **53** (05-06), Mei-Juni 2005.

Sklair, Leslie. 2002, "Demokrasi and Transnational Capitalist Class", *ANNAL AAPSS*, **581**, Mei 2002.

Yeates, Nicola. 2002, "Globalization and Social Policy: From Global Neoliberal Hegemony to Global Political Pluralism", *Global Social Policy*, **2** (x): 69-91.